



BPDP



2025 LAPORAN KINERJA

Badan Pengelola Dana Perkebunan
Kementerian Keuangan



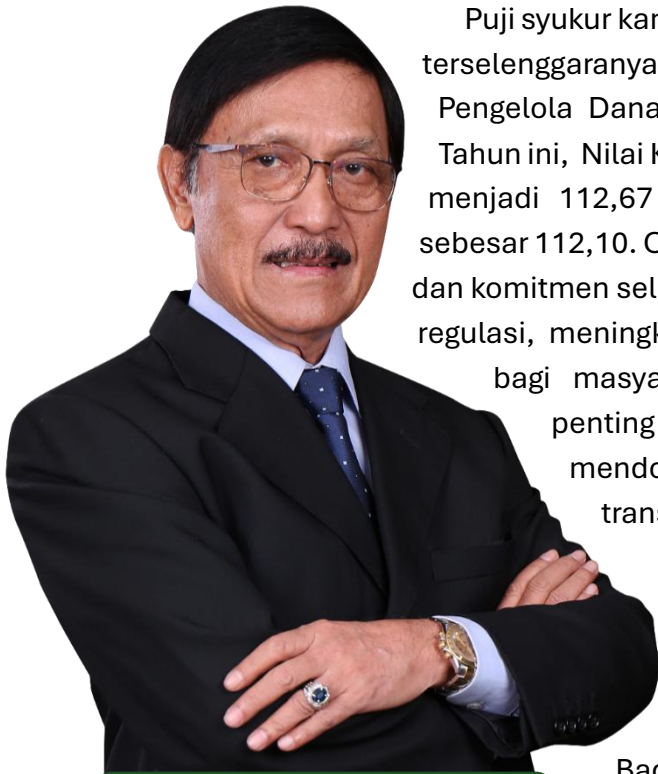
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

@ info@bpdp.or.id

🌐 bpdp.or.id

📷 ig: bpdp.id

KATA PENGANTAR



EDDY ABDURRACHMAN
Direktur Utama

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya berbagai program dan kegiatan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) sepanjang tahun 2025. Tahun ini, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2025 meningkat menjadi 112,67 melampaui pencapaian tahun sebelumnya sebesar 112,10. Capaian yang diraih merupakan hasil kerja keras dan komitmen seluruh jajaran BPDP dalam menjalankan amanat regulasi, meningkatkan layanan, serta menghadirkan manfaat bagi masyarakat luas. Tahun ini menjadi momentum penting bagi BPDP dalam memperkuat perannya mendorong tata kelola dana perkebunan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Tahun 2025 juga menjadi tonggak transformasi kelembagaan melalui reorganisasi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS) menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2025. Transformasi ini merupakan langkah strategis untuk memperluas mandat, meningkatkan efektivitas kelembagaan, serta memperkuat BPDP sebagai lembaga yang adaptif, modern, dan berorientasi pada tata kelola yang baik.

BPDP ditetapkan berdasarkan PMK Nomor 6 Tahun 2025 sebagai unit organisasi non-eselon di lingkungan Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan. Pembentukan badan ini merupakan implementasi dari mandat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 mengenai Penghimpunan Dana Perkebunan, serta Peraturan Presiden nomor 132 Tahun 2024 mengenai Pengelolaan Dana Perkebunan. Untuk memastikan fleksibilitas dalam operasionalnya, BPDP telah ditetapkan kembali sebagai satuan kerja dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 46 Tahun 2025.

Sepanjang tahun 2025, BPDP terus memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam penghimpunan, pengembangan, dan penyaluran dana secara profesional, transparan, serta sesuai prinsip tata kelola yang baik. Berbagai program strategis yang dilaksanakan mencerminkan komitmen untuk mendukung keberlanjutan komoditas perkebunan nasional, mulai dari peningkatan produktivitas, pengembangan sarana dan prasarana, hingga program kemitraan serta penguatan sumber daya manusia. Seluruh

upaya ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan dampak nyata bagi petani, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas publik, BPDP memiliki kewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) setiap tahun. LAKIN BPDP Tahun 2025 ini memuat berbagai capaian kinerja, perkembangan program, serta evaluasi pelaksanaan kegiatan yang menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan peningkatan efektivitas di tahun berikutnya. Dokumen ini tidak hanya menjadi media pertanggungjawaban kepada pihak-pihak berkepentingan, tetapi juga menjadi instrumen penting bagi seluruh jajaran BPDP dalam mengidentifikasi peluang perbaikan, menjawab berbagai tantangan yang terus berkembang, serta memperkuat sinergi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di masa mendatang.

Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran BPDP, baik pimpinan maupun pegawai atas dedikasi serta kontribusi besar dalam pencapaian kinerja tahun 2025. Dengan komitmen bersama, BPDP akan terus menjadi lembaga yang dinamis dan terpercaya dalam mewujudkan visi besar pengembangan perkebunan yang berkelanjutan.

Direktur Utama,



Ditandatangani secara elektronik
Eddy Abdurrachman



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
BAB 1 Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	2
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	3
C. Peran Strategis.....	6
D. Sistematika Laporan.....	7
BAB 2 Perencanaan Kinerja	8
A. Rencana Strategis	9
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	9
C. Rencana Kerja dan Anggaran BPDP Tahun 2025.....	12
BAB 3 Akuntabilitas Kinerja	13
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	14
1a-CP Persentase penghematan devisa atas mandatory biodiesel	16
1b-CP Persentase volume penyaluran biodiesel	18
1c-CP Persentase jumlah orang/peserta program pengembangan SDM Perkebunan ..	20
1d-CP Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> dan pengguna layanan	24
2a-N Persentase penyaluran dana peremajaan perkebunan rakyat	25
2b-N Persentase penyaluran dana sarana dan prasarana perkebunan	27
2c-N Persentase kualitas riset perkebunan yang dikelola.....	28
3a-CP Tingkat maturitas BLU	31
3b-N Persentase tingkat harga CPO	32
3c-N Indeks akurasi proyeksi pendapatan dan belanja BLU.....	34
4a-CP Tingkat Imbal Hasil Pengelolaan Dana dan Kas.....	36
4b-N Persentase Penghimpunan Dana	39
5a-N Persentase efektivitas program promosi dan kerja sama	41
5b-N Persentase penyelesaian kerja sama dalam rangka perluasan pasar ekspor perkebunan.....	42
6a-CP Persentase penyelesaian Rekomendasi penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR).....	45

6b-N Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan dari Pembina Keuangan / Pembina Teknis / SPI / Dewan Pengawas / APIP dan/atau BPK	47
7a-N Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	49
8a-CP Indeks kinerja anggaran Kemenkeu	50
9a-N Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	52
B. Realisasi Anggaran	54
C. Kinerja Lainnya	56
BAB 4 Penutup	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Susunan Organisasi BPDP	4
Gambar 1.2 Statistik Sumber Daya Manusia BPDP	5
Gambar 2.1 Peta Strategi BPDP Tahun 2025.....	10
Gambar 3.1 Grafik Pendapatan dan Persentase Imbal Hasil Dana Kelolaan.....	39
Gambar 3.2 Keynote Speech Seditjen Perbendaharaan	57
Gambar 3.3 Sosialisasi Beasiswa Sawit bagi Generasi Muda NTT	58
Gambar 3.4 Penghargaan SIEXPO 2025	59
Gambar 3.5 Penghargaan Sawit Indonesia Award 2025	60
Gambar 3.6 Penghargaan Indonesia Tourism & Trade Investment Expo 2025.....	60
Gambar 3.7 Apresiasi dari Ombudsman RI	61

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sasaran Strategi dan Indikator Kinerja BPDP Tahun 2025	10
Tabel 2.2 Alokasi Dana Awal BPDP Tahun 2025	12
Tabel 3.1 Nilai Kinerja Organisasi BPDP Tahun 2025	14
Tabel 3.2 Perbandingan Nilai Kinerja Organisasi BPDP 2021-2025	14
Tabel 3.3 Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BPDP Tahun 2025.....	15
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1	16
Tabel 3.5 Capaian Penghematan Devisa atas Mandatory Biodiesel.....	17
Tabel 3.6 Data Volume Penyaluran Biodiesel dan Rata-rata Harga Solar.....	17
Tabel 3.7 Capaian IKU Persentase volume Penyaluran Biodiesel.....	18
Tabel 3.8 Rincian realisasi penyaluran Biodiesel	19
Tabel 3.9 Capaian Persentase Jumlah Orang/Peserta Program Pengembangan SDM Perkebunan	20
Tabel 3.10 Rincian Jumlah Penerima Program Pendidikan SDM Perkebunan 2025.....	21
Tabel 3.11 Rincian Jumlah Penerima Program Pelatihan SDM Perkebunan 2025	23
Tabel 3.12 Capaian tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan.....	24
Tabel 3.13 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2	25
Tabel 3.14 Capaian Persentase penyaluran dana peremajaan perkebunan rakyat.....	26
Tabel 3.15 Perhitungan IKU Penyaluran Dana PSR	27
Tabel 3.16 Capaian Persentase penyaluran dana sarana dan prasarana perkebunan ..	28
Tabel 3.17 Perhitungan IKU Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana Perkebunan	28
Tabel 3.18 Nilai kualitas luaran / kebermanfaatan riset	29
Tabel 3.19 Capaian Persentase kualitas riset perkebunan yang dikelola.....	30
Tabel 3.20 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3	31
Tabel 3.21 Capaian Tingkat Maturitas BLU	32
Tabel 3.22 Capaian Persentase tingkat harga CPO	32
Tabel 3.23 Tingkat Harga CPO Tahun 2025	33
Tabel 3.23 Kriteria ketepatan waktu penyampaian data	34
Tabel 3.24 Kriteria deviasi rencana dan realisasi pengesahan	34
Tabel 3.26 Capaian Persentase tingkat harga CPO	35
Tabel 3.27 Rekapitulasi Data Ketepatan Waktu Penyampaian dan Akurasi Proyeksi....	35

Tabel 3.28 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3	36
Tabel 3.29 Capaian Tingkat Imbal Hasil Pengelolaan Dana dan Kas	37
Tabel 3.30 Dana Kelolaan Imbal Hasil Portofolio Dana Investasi.....	38
Tabel 3.31 Capaian Persentase Penghimpunan Dana	40
Tabel 3.32 Pendapatan Pungutan Ekspor Tahun 2025	40
Tabel 3.33 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5	41
Tabel 3.34 Capaian Persentase efektivitas program promosi dan kerja sama	41
Tabel 3.35 Realisasi kegiatan dan sasaran promosi dan kerja sama	42
Tabel 3.36 Realisasi kualitas pengelolaan informasi	42
Tabel 3.37 Realisasi tingkat pemahaman peserta.....	42
Tabel 3.38 Kriteria kegiatan perluasan pasar ekspor perkebunan.....	43
Tabel 3.39 Capaian Persentase penyelesaian kerja sama dalam rangka perluasan pasar ekspor perkebunan	43
Tabel 3.40 Realisasi kegiatan kerja sama dalam rangka perluasan pasar ekspor perkebunan	44
Tabel 3.41 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6	45
Tabel 3.42 Capaian Persentase penyelesaian rekomendasi penilaian TKPMR.....	47
Tabel 3.43 Capaian Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan dari Pembina Keuangan / Pembina Teknis / SPI / Dewan Pengawas / APIP dan/atau BPK....	47
Tabel 3.44 Capaian Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	49
Tabel 3.45 Kriteria Indeks Capaian Kinerja Anggaran.....	50
Tabel 3.46 Capaian Indeks Kinerja Anggaran Kemenkeu	51
Tabel 3.47 Rincian hasil penilaian IKPA dan EKA.....	51
Tabel 3.48 Indikator Penilaian Modernisasi Pengelolaan BLU	52
Tabel 3.48 Capaian Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU.....	53
Tabel 3.50 Capaian Integrasi Data (extra miles)	53
Tabel 3.51 Rincian Anggaran BPDP Tahun 2025	54
Tabel 3.52 Rincian Realisasi Anggaran.....	55
Tabel 3.53 Rincian Realisasi Anggaran Belanja dan Output Tahun 2025	55

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi Badan Pengelola Dana Perkebunan, telah disusun Peta Strategi Tahun 2025 berdasarkan sistem manajemen kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) yang terdiri atas 4 (empat) perspektif, yaitu *stakeholder*, *customer*, *internal process*, dan *learning and growth*. Peta Strategi BPDP tersebut terdiri atas 9 (sembilan) Sasaran Strategis, yaitu 1 (satu) SS pada *stakeholder perspective*, 1 (satu) SS pada *customer perspective*, 4 (empat) SS pada *internal process*, dan 3 (tiga) SS pada *learning and growth perspective*. Penilaian terhadap tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategian tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang didasarkan pada kriteria SMART-C (*Specific, Measureable, Agreeable, Realistic, Time-bounded, dan Continuously Improved*).

Pada tahun 2025, telah ditetapkan 19 (sembilan belas) IKU BPDP pada level *Kemenkeu-Two*. Secara umum, pencapaian kinerja BPDP atas sebagian besar IKU telah mencapai target, dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 112,67. Pencapaian kinerja BPDP pada tahun 2025 dapat dilihat dari indikator- indikator sebagai berikut:

1. IKU 1a-CP Persentase penghematan devisa atas mandatory biodiesel dengan target 100%, realisasi sebesar 102,6%, sehingga capaian 102,6%.
2. IKU 1b-CP Persentase volume penyaluran biodiesel dengan target 100%, realisasi sebesar 134%, sehingga capaian 120%.
3. IKU 1c-CP Persentase jumlah orang/peserta program pengembangan SDM Perkebunan dengan target 100%, realisasi sebesar 181%, sehingga capaian 120%.
4. IKU 1d-CP Tingkat kepuasan *stakeholder* dan pengguna layanan dengan target 100%, realisasi sebesar 107,58%, sehingga capaian 107,58%.
5. IKU 2a-N Persentase penyaluran dana peremajaan perkebunan rakyat dengan target 100%, realisasi sebesar 84,91%, sehingga capaian 84,91%.
6. IKU 2b-N Persentase penyaluran dana sarana dan prasarana perkebunan dengan target 100%, realisasi sebesar 141%, sehingga capaian 120%.
7. IKU 2c-N Persentase kualitas riset perkebunan yang dikelola dengan target 100%, realisasi sebesar 131%, sehingga capaian 120%.
8. IKU 3a-CP Tingkat maturitas BLU dengan target 3 (skala 5) realisasi sebesar 3, sehingga capaian 100%.
9. IKU 3b-N Persentase tingkat harga CPO dengan target 100%, realisasi sebesar 125%, sehingga capaian 120%.
10. IKU 3c-N Indeks akurasi proyeksi pendapatan BLU dengan target 3,5 (skala 5) realisasi sebesar 4,97, sehingga capaian 120 %.
11. IKU 4a-CP Tingkat Imbal Hasil Pengelolaan Dana dan Kas dengan target 100% realisasi sebesar 125%, sehingga capaian 125%.
12. IKU 4b-N Persentase Penghimpunan Dana dengan target 100% realisasi sebesar 112%, sehingga capaian 112%.

13. IKU 5a-N Persentase efektivitas program promosi dan kerja sama dengan target 100%, realisasi sebesar 143%, sehingga capaian 120%.
14. IKU 5b-N Persentase penyelesaian kerja sama dalam rangka perluasan pasar ekspor perkebunan dengan target 100%, realisasi sebesar 221%, sehingga capaian 120%.
15. IKU 6a-CP Persentase penyelesaian rekomendasi penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko dengan target 100% realisasi sebesar 118,75%, sehingga capaian 118,75%.
16. IKU 6b-N Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan dari Pembina Keuangan / Pembina Teknis / SPI / Dewan Pengawas / APIP dan/atau BPK dengan target 97%, realisasi sebesar 98,99%, sehingga capaian 102%.
17. IKU 7a-N Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization* dengan target 85 realisasi sebesar 89, sehingga capaian 104%.
18. IKU 8a-CP Indeks kinerja anggaran Kemenkeu dengan target 100, realisasi sebesar 120, sehingga capaian 120%.
19. IKU 9a-N Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU dengan target 100%, realisasi sebesar 124%, sehingga capaian 120%.

Pada sisi pengelolaan anggaran, BPDP telah merealisasikan penyerapan anggaran pada DIPA TA 2025 sebesar 90%, atau sebesar Rp49,8 Triliun,- dari total pagu akhir sebesar Rp55,39 Triliun. Dari sisi pendapatan TA 2025, realisasi mencapai 132% atau sebesar Rp33,2 Triliun dari estimasi pendapatan pada DIPA sebesar Rp25,15 Triliun. Secara umum, realisasi anggaran BPDP selaras dengan *output* yang direncanakan. Sebagian besar kegiatan mencapai target keluaran, bahkan beberapa program strategis melampaui target dan hanya terdapat 1 kegiatan yang belum mencapai target keluaran.

BPDP terus melaksanakan perbaikan organisasi melalui penguatan manajemen dan layanan, peningkatan integritas pegawai, serta optimalisasi pengelolaan kinerja. Capaian kinerja yang telah diraih perlu dipertahankan dan ditingkatkan, sementara area yang belum memenuhi target memerlukan evaluasi menyeluruh. Dengan langkah tersebut, kinerja BPDP pada tahun-tahun mendatang diharapkan semakin optimal dan selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yaitu merupakan unit organisasi non eselon di lingkungan Kementerian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan. Tujuan pembentukan Badan ini untuk mendorong pengembangan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan melalui kegiatan penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana perkebunan kelapa sawit sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan dan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

BPDPKS didirikan pada bulan Juni 2015 sebagai respons Pemerintah untuk menjaga keberlanjutan perkebunan kelapa sawit. Pada era tersebut, minyak sawit (*Crude Palm Oil/CPO*) sebagai produk utama mengalami tren penurunan harga yang cukup tajam. Untuk memberikan fleksibilitas dalam operasionalnya, BPDPKS telah ditetapkan sebagai satuan kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 650/KMK.05/2015.

Reorganisasi

Melihat keberhasilan BPDPKS dalam mengelola dana sawit untuk mendukung keberlanjutan industri dan menstabilkan harga kelapa sawit, Presiden memandang bahwa pendekatan pengelolaan yang efektif tersebut diperlukan pula untuk memperkuat prospek komoditas kakao dan kelapa nasional. Dalam Rapat Internal Presiden tahun 2024, diputuskan langkah strategis untuk melakukan penguatan dua komoditas tersebut melalui perluasan mandat BPDPKS. Presiden menugaskan BPDPKS untuk tidak hanya mengelola dana sawit, tetapi juga dana untuk komoditas kakao dan kelapa.

Selanjutnya, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan pada tanggal 18 Oktober 2024 yang mencabut Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 jo Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Dalam Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024 mencakup beberapa hal, antara lain:

1. Komoditas yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana, yaitu kelapa sawit, kakao, dan kelapa.

2. Penetapan organisasi Badan Pengelola Dana pengganti Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Presiden diundangkan atau maksimal 18 Januari 2025.

Perubahan kelembagaan BPDPKS menjadi BPDP ditegaskan melalui penetapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan, yang ditetapkan dan diundangkan pada 17 Januari 2025 oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. PMK ini turut mencabut PMK 113/PMK.01/2015 yang sebelumnya menjadi dasar organisasi dan tata kerja BPDPKS. Untuk memastikan fleksibilitas dalam operasionalnya, BPDP telah ditetapkan kembali sebagai satuan kerja dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 46 Tahun 2025.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada *good governance* harus memenuhi asas akuntabilitas, yaitu kewajiban setiap penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan kegiatan dan hasil kinerjanya kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Salah satu perwujudan asas tersebut adalah penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN). LAKIN BPDP Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban BPDP atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2025, sekaligus sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian kinerja dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi organisasi. Penyusunan LAKIN ini juga merupakan pelaksanaan amanat regulasi, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan, BPDP bertugas untuk melaksanakan perencanaan dan penganggaran, penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran penggunaan Dana Perkebunan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban, serta pengawasan.

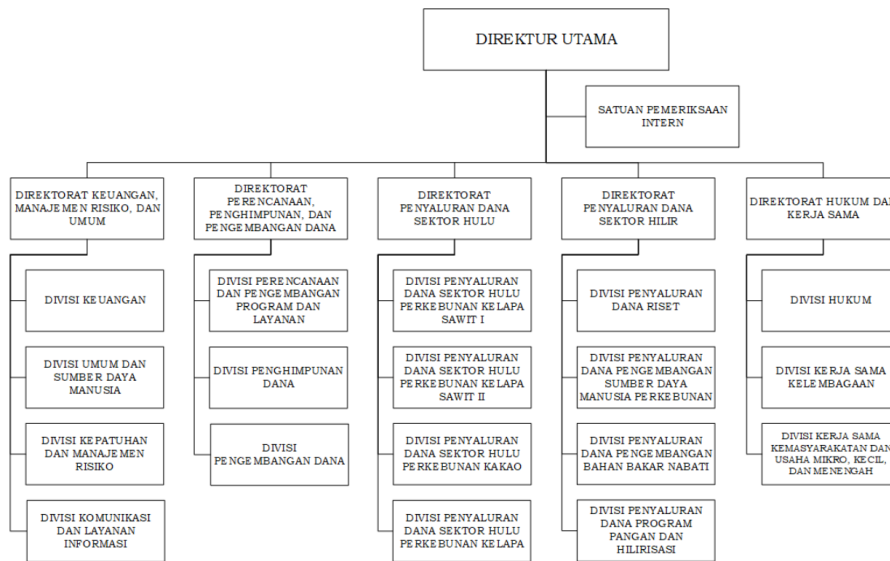
Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPDP menyelenggarakan fungsi:

1. perencanaan dan penganggaran;
2. pelaksanaan penghimpunan Dana;
3. pelaksanaan pengembangan Dana;
4. pelaksanaan penyaluran Dana sektor hulu dan hilir;
5. pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban Dana;
6. pelaksanaan pengawasan pengelolaan Dana;

7. penyusunan peraturan dan perjanjian, serta pelaksanaan advokasi hukum;
8. pelaksanaan kerja sama kelembagaan dan kemasyarakatan;
9. pelaksanaan pengawasan intern atas pelaksanaan tugas Badan Pengelola Dana;
10. pengelolaan keuangan, umum, sumber daya manusia, kepatuhan internal, manajemen kinerja dan risiko, komunikasi, serta sistem informasi dan basis data;
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Komite Pengarah.

Susunan Organisasi BPDP sesuai PMK Nomor 6 Tahun 2025, sebagai berikut:

Gambar 1.1 Susunan Organisasi BPDP



Visi

Guna mendukung prioritas pemerintah jangka menengah serta selaras dengan arahan dari Komite Pengarah BPDP, maka BPDP menetapkan visi organisasi sebagaimana tercantum pada dokumen Rencana Strategis Bisnis tahun 2025–2029, berubah dari semula:

“Menjadi badan pengelola dana yang terpercaya dalam pengembangan sawit berkelanjutan sebagai komoditas strategis nasional untuk kesejahteraan rakyat Indonesia”.

Menjadi:

“Menjadi badan pengelola dana yang dinamis dan terpercaya dalam pengembangan komoditas perkebunan strategis nasional yang bernilai tambah, berdaya saing, dan berkelanjutan demi kemajuan, kemandirian, serta kesejahteraan rakyat”

Dengan visi tersebut, BPDP diharapkan mampu memainkan peran strategis dalam mendorong perkembangan sektor perkebunan nasional. Visi ini menegaskan peran BPDP sebagai pengelola dana yang tidak hanya berfokus pada tata kelola keuangan, tetapi juga menjadi katalisator dalam mendorong transformasi sektor perkebunan agar semakin bernilai tambah, berdaya saing, dan berkelanjutan. Melalui peran tersebut,

BPDP berkomitmen mendukung kemajuan, kemandirian, serta peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Misi

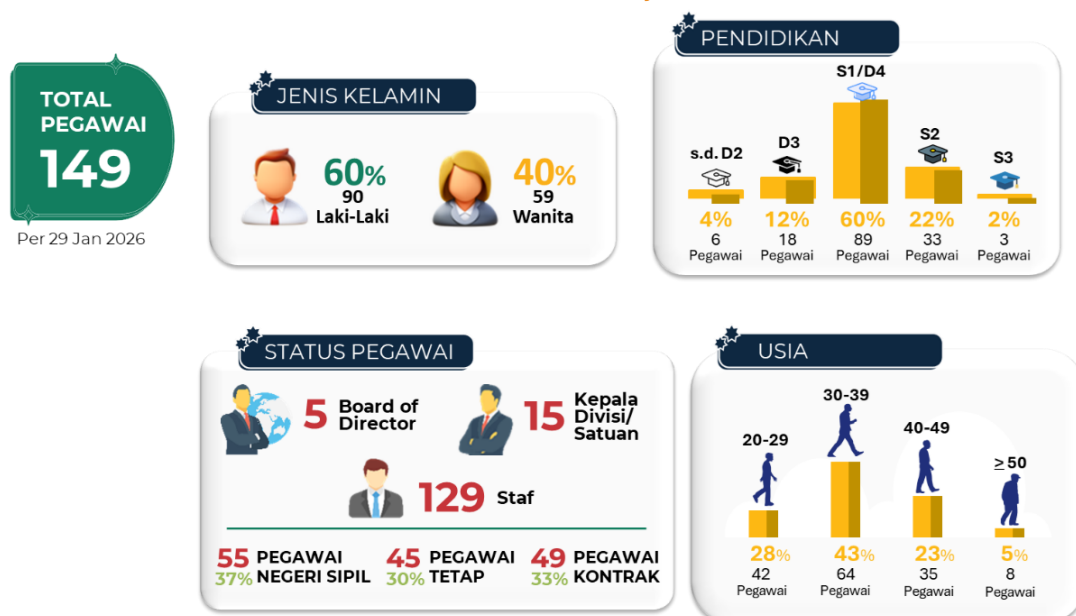
Adapun untuk mencapai visi tersebut, BPDP menetapkan misi yang akan dicapai pada tahun 2025–2029, sebagai berikut:

1. Menghimpun, mengembangkan dan menyalurkan dana perkebunan secara transparan, akuntabel, dan efisien;
2. Melaksanakan peningkatan kualitas SDM untuk mendukung pengembangan industri hulu dan hilir yang berkelanjutan, penerapan praktik *green economy*, dan prinsip ekonomi sirkuler;
3. Melaksanakan peningkatan kualitas sarana dan prasarana perkebunan untuk mendukung pengembangan industri hulu dan hilir yang berkelanjutan;
4. Melaksanakan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan keberlanjutan komoditas perkebunan;
5. Melaksanakan kegiatan promosi hulu dan hilir perkebunan;
6. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan penataan perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraan pekebun;
7. Melaksanakan pengelolaan dana rangka pemenuhan kebutuhan strategis perkebunan melalui kegiatan transisi energi dan hilirisasi industri.

Sumber Daya Manusia

Guna mendukung pencapaian visi dan misi BPDP tersebut, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal dan memegang teguh komitmen pada integritas, moralitas, dan profesionalitas. Pada akhir tahun 2025, SDM BPDP sejumlah 149 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 1.2 Statistik Sumber Daya Manusia BPDP



C. Peran Strategis

Pemerintah telah menetapkan visi pembangunan 2025–2029 untuk mewujudkan “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” yang kemudian dijabarkan dalam delapan misi (Asta Cita). Di antara Prioritas Nasional RPJMN 2025–2029, terdapat tiga prioritas yang relevan dengan peran Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) sebagai Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan.

Pertama, BPDP berkontribusi dalam mendukung terwujudnya kemandirian pangan dan energi sebagaimana tertuang pada **asta cita kedua**. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kapasitas produksi komoditas perkebunan serta dukungan terhadap transisi energi nasional. Optimalisasi sumber energi terbarukan menjadi penting untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan memanfaatkan potensi sumber daya alam Indonesia yang melimpah.

Kedua, BPDP berperan pada **asta cita ketiga** dalam pengembangan industri agromaritim dan sektor usaha perkebunan, terutama di sentra produksi. Peran ini mencakup penguatan kemitraan dengan UMKM, koperasi, dan pelaku usaha lainnya untuk menciptakan ekosistem industri yang produktif dan kompetitif. Dukungan ini diharapkan meningkatkan efisiensi produksi serta daya saing produk di pasar domestik dan global.

Ketiga, BPDP menjadi bagian dari agenda hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam yang menjadi prioritas nasional sesuai **asta cita kelima**. Melalui berbagai program seperti penelitian dan pengembangan, peremajaan, peningkatan sarana-prasarana, dan promosi, BPDP mendorong diversifikasi produk perkebunan serta memperkuat sektor hilir industri. Langkah ini mendukung terbentuknya struktur industri yang inklusif, inovatif, dan bernilai tambah tinggi.

Selain itu, BPDP juga memegang peran strategis dalam implementasi transisi energi melalui dukungan terhadap kebijakan peningkatan konsumsi *biofuel*, fasilitas investasi pemerintah di bidang energi terbarukan, dan perluasan pemanfaatan *biofuel*. Peran ini mencakup penguatan ekosistem biodiesel nasional, dukungan penelitian energi terbarukan, serta kolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

Secara keseluruhan, BPDP berperan penting dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi, mendorong hilirisasi industri perkebunan, meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, serta mendukung agenda transisi energi nasional melalui pengelolaan dana perkebunan yang efektif dan berkelanjutan.

D. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja disusun dengan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-277/PB/2022 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja dan Laporan Reviu Atas Laporan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Laporan ini menyajikan informasi tentang:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi. Bab ini memuat antara lain Latar Belakang, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Peran Strategis, dan Sistematika Laporan.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan rencana strategis dan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun pelaporan.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan terkait Capaian Kinerja Organisasi, Realisasi Anggaran, dan Kinerja Lainnya.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

5. Lampiran

Perjanjian Kinerja BPDP Tahun 2025 dan dokumen pendukung lainnya.

BAB 2

Perencanaan Kinerja

- Rencana Strategis
- Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025
- Kinerja Lainnya



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Pemerintah telah merumuskan visi pembangunan ekonomi 2025–2029 dengan tema “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, yang diwujudkan melalui delapan misi atau Asta Cita sebagai prioritas nasional. Beberapa prioritas yang berkaitan dengan peran BPDP mencakup pencapaian swasembada pangan dan energi, pengembangan industri agromaritim, serta hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam. Dalam upaya mewujudkan swasembada pangan, pemerintah berfokus pada peningkatan kapasitas produksi dalam negeri, sementara transisi ke energi terbarukan menjadi strategi utama dalam swasembada energi.

BPDP turut berkontribusi dalam pengembangan sektor perkebunan melalui berbagai program, seperti penelitian, peremajaan, serta penguatan kemitraan dengan UMKM dan koperasi untuk meningkatkan daya saing industri. Dalam mendukung transisi energi, BPDP memainkan peran penting dalam penerapan *biofuel* melalui kebijakan peningkatan konsumsi, fasilitas investasi pemerintah, dan ekspansi pemanfaatan *biofuel* yang juga menjadi program prioritas di Kementerian Keuangan. Berbagai inisiatif, seperti optimalisasi pengelolaan dana investasi untuk transisi energi serta penelitian dan pengembangan produk turunan kelapa sawit, diharapkan dapat mempercepat realisasi energi berkelanjutan. Selain itu, BPDP berperan dalam membangun ekosistem industri berbasis inovasi dan teknologi, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi produksi, menciptakan lapangan kerja baru, serta meningkatkan kesejahteraan pekebun dan pelaku UMKM.

Strategis Bisnis

Sebagai upaya pencapaian visi, misi, dan tujuan Badan Pengelola Dana Perkebunan, strategi bisnis yang disusun untuk 5 tahun ke depan (2025-2029) adalah:

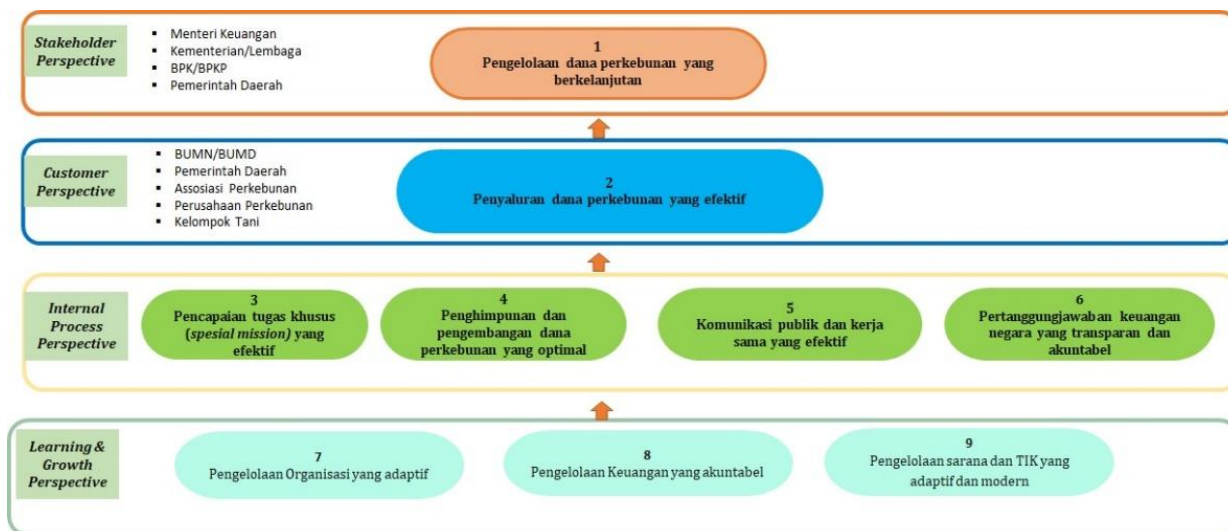
1. Peningkatan tata kelola dan bisnis BPDP;
2. Peningkatan kesejahteraan pekebun;
3. Stabilisasi harga komoditas;
4. Peningkatan nilai tambah komoditas perkebunan;
5. Peningkatan efisiensi produksi dan hilirisasi industri;
6. Pengembangan kelembagaan dan perolehan pendanaan alternatif;
7. Penguatan peran BPDP dalam mendorong transisi energi berkelanjutan;
8. Penguatan kerja sama, kemitraan, dan kolaborasi strategis.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Penetapan Kinerja BPDP tahun 2025 yang tertuang dalam Kontrak Kinerja Direktur Utama BPDP dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Pembina Teknis, dijabarkan dalam 9 (sembilan) Sasaran Strategis (SS) dan 18 (delapan belas) Indikator

Kinerja Utama (IKU). Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang terangkum dalam Peta Strategi BPDP tahun 2025 tersebut sesuai pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Peta Strategi BPDP Tahun 2025



Sasaran Strategis BPDP Tahun 2025 diklasifikasikan sebagai berikut:

1. **Perspektif Stakeholder:** Pengelolaan dana perkebunan yang berkelanjutan.
2. **Perspektif Customer:** Penyaluran dana perkebunan yang efektif.
3. **Perspektif Internal Process:**
 - a. Pencapaian tugas khusus (*special mission*) yang efektif;
 - b. Penghimpunan dan pengembangan dana perkebunan yang optimal;
 - c. Komunikasi publik dan kerja sama yang efektif;
 - d. Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
4. **Perspektif Learning and Growth:**
 - a. Pengelolaan Organisasi yang adaptif;
 - b. Pengelolaan Keuangan yang akuntabel;
 - c. Pengelolaan sarana dan TIK yang adaptif dan modern.

Sasaran strategis tersebut kemudian diturunkan menjadi indikator kinerja utama tahun 2025 sebagaimana tabel 2.1.

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPDP Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target
I	Stakeholder Perspective (30%)			
1	Pengelolaan dana perkebunan yang berkelanjutan	1a-CP	Persentase penghematan devisa atas <i>mandatory</i> biodiesel	100%
2		1b-CP	Persentase volume penyaluran biodiesel	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target
3		1c-CP	Persentase jumlah orang/peserta program pengembangan SDM Perkebunan	100%
4		1d-CP	Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> dan pengguna layanan	100%
II	Customer Perspective (20%)			
5	Penyaluran dana perkebunan yang efektif	2a-N	Persentase penyaluran dana peremajaan perkebunan rakyat	100%
6		2b-N	Persentase penyaluran dana sarana dan prasarana perkebunan	100%
7		2c-N	Persentase kualitas riset perkebunan yang dikelola	100%
III	Internal Process Perspective (25%)			
8	Pencapaian tugas khusus (special mission) yang efektif	3a-CP	Tingkat maturitas BLU	3 (skala 5)
9		3b-N	Persentase tingkat harga CPO	100%
10		3c-N	Indeks akurasi proyeksi pendapatan BLU	3,5 (skala 5)
11	Penghimpunan dan pengembangan dana perkebunan yang optimal	4a-CP	Tingkat Imbal Hasil Pengelolaan Dana dan Kas	100%
12		4b-N	Persentase Penghimpunan Dana	100%
13	Komunikasi publik dan kerja sama yang efektif	5a-N	Persentase efektivitas program promosi dan kerja sama	100%
14		5b-N	Persentase penyelesaian kerja sama dalam rangka perluasan pasar ekspor perkebunan	100%
15	Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel	6a-CP	Persentase penyelesaian rekomendasi penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko	100%
16		6b-N	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan dari Pembina Keuangan / Pembina Teknis / SPI / Dewan Pengawas / APIP dan/atau BPK	97%
IV	Learning and Growth Perspective (25%)			
17	Pengelolaan Organisasi yang adaptif	7a-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	85
18	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	8a-CP	Indeks kinerja anggaran Kemenkeu	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target
19	Pengelolaan sarana dan TIK yang adaptif dan modern	9a-N	Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	100%

C. Rencana Kerja dan Anggaran BPDP Tahun 2025

Sebagaimana disepakati dalam Kontrak (Perjanjian) Kinerja Tahun 2025, dalam upaya mencapai 9 (sembilan) sasaran strategis dan 19 (sembilan belas) indikator kinerja utama tersebut, BPDP didukung pendanaan awal sebesar Rp6.056.135.600.000,-. Pendanaan tersebut dipergunakan untuk 7 klasifikasi rincian *output* dengan rincian kegiatan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Alokasi Dana Awal BPDP Tahun 2025

No.	Program / Kegiatan Tahun 2025	Anggaran (Rp)
1	Pelaksanaan Tugas Khusus (<i>Spesial Mission</i>)	5.942.135.600.000
2	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	500.000.000
3	Layanan Dukungan Manajemen Internal	103.184.364.000
4	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.050.000.000
5	Layanan Manajemen SDM Internal	2.397.000.000
6	Layanan Manajemen Kinerja Internal	2.953.636.000
7	Sistem Informasi Pemerintahan	3.915.000.000
Total		6.056.135.600.000

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

- Capaian Kinerja Organisasi
- Realisasi Anggaran
- Kinerja Lainnya



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja BPDP tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BPDP adalah sebesar 112,67. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada setiap perspektif sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Nilai Kinerja Organisasi BPDP Tahun 2025

No.	Perspektif <i>Balanced Scorecard</i> (BSC)	Bobot	Nilai	Nilai Tertimbang
1	<i>Stakeholder</i>	30%	112,24	33,52
2	<i>Customer</i>	20%	108,30	21,66
3	<i>Internal Process</i>	25%	115,00	28,75
4	<i>Learning and Growth</i>	25%	114,96	28,74
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)				112,67

Catatan Status NKO:

100 ≤ NKO ≤ 120 = memenuhi ekspektasi

80 ≤ NKO ≤ 100 = belum memenuhi ekspektasi

NKO ≤ 80 = tidak memenuhi ekspektasi

Perbandingan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BPDP dari tahun 2021 s.d. 2025 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Perbandingan Nilai Kinerja Organisasi BPDP 2021-2025

No.	Perspektif BSC	2021	2022	2023	2024	2025
1	<i>Stakeholder</i>	30	= 30	↑ 34,20	↑ 34,22	↓ 33,52
2	<i>Customer</i>	16,70	↓ 15,53	↑ 21,71	↑ 22,60	↓ 21,66
3	<i>Internal Process</i>	33,75	↑ 34,63	↑ 28,26	↓ 27,97	↑ 28,75
4	<i>Learning and Growth</i>	33,14	↓ 33,05	↓ 27,35	↓ 27,31	↑ 28,74
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)		113,59	113,20	111,52	112,10	112,67

Sumber: LAKIN BPDP Tahun 2024, Aplikasi Intense

Secara terperinci, capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BPDP tahun 2025 dari 9 sasaran strategis dan 19 IKU sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BPDP Tahun 2025

No	Kode IKU	IKU	Target	Realisasi	Pol	V/C*	C	Bobot	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian IKU/NSS/Np
I Stakeholder Perspektif (30%)										33.52%
1 Pengelolaan dana perkebunan yang berkelanjutan										111.73%
1	1a-CP	Persentase penghematan devisa atas mandatory biodiesel	100%	102.60%	Max	PL	M	19%	31.15%	102.60%
2	1b-CP	Persentase volume penyaluran biodiesel	100%	129%	Max	PM	M	14%	22.95%	120.00%
3	1c-CP	Persentase jumlah orang/peserta program pengembangan SDM Perkebunan	100%	181%	Max	PM	M	14%	22.95%	120.00%
4	1d-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	108%	Max	PM	M	14%	22.95%	107.58%
								61%	100.00%	
II Customer Perspektif (20%)										21.66%
2 Penyaluran dana perkebunan yang efektif										108.30%
5	2a-N	Persentase penyaluran dana peremajaan perkebunan rakyat	100%	85%	Max	PM	M	14%	33.33%	84.91%
6	2b-N	Persentase penyaluran dana sarana dan prasarana perkebunan	100%	142%	Max	PM	M	14%	33.33%	120.00%
7	2c-N	Persentase kualitas riset perkebunan yang dikelola	100%	131%	Max	PM	M	14%	33.33%	120.00%
								42%	100%	
III Internal Process (25%)										28.75%
3 Pencapaian tugas khusus (spesial mission) yang efektif										113.33%
8	3a-CP	Tingkat maturitas BLU	3	3	Max	PM	M	14%	33.33%	100.00%
9	3b-N	Persentase tingkat harga CPO	100%	126%	Max	PM	M	14%	33.33%	120.00%
10	3c-N	Indeks akurasi proyeksi pendapatan BLU	4	5	Max	PM	M	14%	33.33%	120.00%
								42%	100%	
4 Penghimpunan dan pengembangan dana perkebunan yang optimal										116.35%
11	4a-CP	Tingkat Imbal Hasil Pengelolaan Dana dan Kas	100.00%	125.89%	Max	PM	M	14%	50.00%	120.00%
12	4b-N	Persentase Penghimpunan Dana	100.00%	112.69%	Max	PM	M	14%	50.00%	112.69%
								28%	100%	
5 Komunikasi publik dan kerja sama yang efektif										120.00%
13	5a-N	Persentase efektivitas program promosi dan kerja sama	100%	143%	Max	PM	M	14%	50.00%	120.00%
14	5b-N	Persentase penyelesaian kerja sama dalam rangka perluasan pasar ekspor perkebunan	100%	222%	Max	PM	M	14%	50.00%	120.00%
								28%	100.00%	
6 Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel										110.40%
15	6a-CP	Persentase penyelesaian rekomendasi penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko	100%	118.75%	Max	PM	M	14%	50.00%	118.75%
16	6b-N	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan dari Pembina Keuangan/Pembina Teknis/SPI/ Dewan Pengawas/APIP dan/atau BPK	97%	98.99%	Max	PM	M	14%	50.00%	102.05%
								28%	100.00%	
IV Learning and Growth Perspektif (25%)										28.74%
7 Pengelolaan Organisasi yang adaptif										104.88%
17	7a-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	85	89	Max	PM	M	14%	100.00%	104.88%
								14%	100%	
8 Pengelolaan Keuangan yang akuntabel										120.00%
18	8a-CP	Indeks kinerja anggaran Kemenkeu	100	120	Max	PM	M	14%	100.00%	120.00%
								14%	100%	
9 Pengelolaan sarana dan TIK yang adaptif dan modern										120.00%
19	9a-N	Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	100%	124.55%	Max	PM	M	14%	100.00%	120.00%
								14%	100%	
CAPAIAN KINERJA PEGAWAI/ORGANISASI										112.67%

Analisis Kinerja

Pelaksanaan kegiatan *monitoring* dan evaluasi kinerja diselenggarakan melalui Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) di lingkungan Kementerian Keuangan dilaksanakan secara periodik tiap triwulan sebagaimana di atur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam DKRO tersebut, dilakukan pembahasan atas berbagai isu yang perlu menjadi perhatian pimpinan atau berpotensi untuk menghambat pencapaian sasaran strategis organisasi dan indikator kinerja untuk mendapatkan usulan solusi atau arahan Direktur Utama BPDP.

Adapun NKO sebagaimana Tabel 3.3. di atas dapat dijabarkan ke dalam capaian Indikator Kinerja Utama Direktur Utama BPDP tahun 2025, sebagai berikut:

SS 1 Pengelolaan dana perkebunan yang berkelanjutan

Dana perkebunan harus dapat dikelola untuk meningkatkan nilai tambah dari dana penghimpunan yang ada dalam rangka mendukung tujuan penggunaan dana sesuai amanat Perpres 132 tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, BPDP mengidentifikasi 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel 3.4.

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

SS 1: Pengelolaan dana perkebunan yang berkelanjutan					
Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Nilai
1a-CP	Persentase penghematan devisa atas mandatory biodiesel	100%	102,6%	102,6%	102,6%
1b-CP	Persentase volume penyaluran biodiesel	100%	134%	134%	120%
1c-CP	Persentase jumlah orang/peserta program pengembangan SDM Perkebunan	100%	181%	181%	120%
1d-CP	Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> dan pengguna layanan	100%	107,58%	107,58%	107,58%

Uraian mengenai capaian IKU sebagai berikut:

1a-CP Persentase penghematan devisa atas mandatory biodiesel

1. Definisi dan Formula IKU

Perkembangan program biodiesel dari 2016 telah berdampak pada peralihan energi dari *fossil fuel* menjadi *biofuel*. Salah satu indikator peralihan ini, ialah menurunnya impor solar sebagai akibat Indonesia memproduksi sendiri *biofuel* yang dicampur dengan *fossil fuel* menjadi biodiesel. Dengan menurunnya impor solar, maka pemerintah dapat melakukan penghematan devisa. Periode pengukuran tanggal 1 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025.

IKU ini bertujuan untuk mendorong perkembangan program biodiesel yang berdampak menurunnya impor solar, sehingga pemerintah dapat melakukan penghematan devisa. Penghitungan capaian penghematan devisa dilakukan dengan membandingkan jumlah devisa yang berhasil dihemat terhadap target devisa yang dihemat, yang dinyatakan dalam persentase. Target penghematan devisa tersebut ditetapkan sebesar US\$ 8 Miliar.

2. Capaian IKU

Penghitungan penghematan devisa dilakukan dengan asumsi bahwa pemanfaatan biodiesel menggantikan impor minyak solar fosil, dengan besaran penghematan dihitung berdasarkan realisasi volume penyaluran biodiesel dikalikan rata-rata harga solar acuan *Mean of Platts Singapore* (MOPS). Sampai dengan 31 Desember 2025, realisasi volume penyaluran biodiesel mencapai 14,94 Juta Kiloliter dengan harga MOPS rata-rata sebesar USD 87,47/barel. Berdasarkan perhitungan tersebut, realisasi penghematan devisa Mandatori Biodiesel mencapai US\$8,21 miliar yang melampaui target US\$8,00 miliar atau sebesar 102,6%.

Tabel 3.5 Capaian Penghematan Devisa atas Mandatory Biodiesel

BPDP	1a-CP Penghematan Devisa atas Mandatory Biodiesel							
T/R	Q1	Q2	s.d. Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	23,09%	46,18%	46,18%	71,93%	71,93%	102,6%	102,6%	
Capaian	230,90%	153,93%	153,93%	119,88%	119,88%	102,6%	102,6%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	119,88%	119,88%	102,6%	102,6%	

Adapun data realisasi volume penyaluran Biodiesel (sumber: <https://program-biodiesel.bpdp.or.id/>) dan rata-rata harga solar acuan (sumber: investing.com) sebagaimana tertuang pada tabel 3.6.

Tabel 3.6 Data Volume Penyaluran Biodiesel dan Rata-rata Harga Solar

No	Bulan	Vol. Penyaluran (Kiloliter)	Rata-rata Harga MOPS (US\$/barel)	Penghematan Devisa (US\$ Miliar)
1	Januari	1.053.134	94,89	0,63
2	Februari	1.152.535	92,09	0,67
3	Maret	1.260.461	86,24	0,68
4	April	1.204.803	82,49	0,63
5	Mei	1.191.904	78,95	0,59
6	Juni	1.240.886	84,73	0,66
7	Juli	1.208.549	90,12	0,68
8	Agustus	1.292.542	86,59	0,70
9	September	1.282.944	88,18	0,71
10	Oktober	1.309.992	87,53	0,72
11	November	1.283.035	94,44	0,76

No	Bulan	Vol. Penyaluran (Kiloliter)	Rata-rata Harga MOPS (US\$/barrel)	Penghematan Devisa (US\$ Miliar)
12	Desember	1.459.944	83,49	0,77
Rata-rata / Total		14.940.729	87,47	8,21

1b-CP Persentase volume penyaluran biodiesel

1. Definisi dan Formula IKU

Pelaksanaan program mandatori biodiesel yang berkelanjutan adalah upaya Badan Pengelola Dana Perkebunan dalam mendukung program pemerintah untuk menciptakan kestabilan harga CPO dan/atau mengurangi terjadinya fluktuasi harga yang tajam sehingga dapat menjamin keberlangsungan industri sawit yang berkelanjutan. Pada tahun 2025, Pemerintah menetapkan penerapan mandatori Biodiesel B40, yaitu pencampuran 40% biodiesel berbasis minyak sawit (FAME) dengan 60% minyak solar, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Penghitungan capaian IKU penyaluran biodiesel dilakukan dengan membandingkan realisasi volume biodiesel yang disalurkan terhadap target penyaluran yang ditetapkan. Dalam hal realisasi penyaluran melebihi target yang ditetapkan, maka capaian dihitung sebesar 100% ditambah kontribusi kelebihan penyaluran yang diperhitungkan secara proporsional dari selisih antara realisasi penyaluran dan target, dibandingkan dengan alokasi volume yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan bobot 50%. Target kinerja penyaluran tahun 2025 ditetapkan sebesar 13,5 juta Kiloliter, sedangkan alokasi Biodiesel yang ditetapkan pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri ESDM sebesar 15,6 juta kiloliter.

Adapun tujuan IKU ini adalah memberikan insentif biodiesel kepada Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BUBBN) guna mendukung program penggunaan bahan bakar biodiesel secara luas di masyarakat.

2. Capaian IKU

Berdasarkan Sistem Informasi Program Biodiesel (<https://program-biodiesel.bpdp.or.id/>), total volume penyaluran Biodiesel sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar 14.940.729 Kiloliter, dengan rincian kategori *Public Service Obligation* (PSO) sebesar 6.908.804 Kl dan kategori Non-PSO sebesar 8.031.926 Kl. Realisasi tersebut melampaui target, sehingga berdasarkan formula penghitungan kinerja yang ditetapkan, realisasi capaian IKU mencapai 134% yang menunjukkan bahwa penyaluran biodiesel terlaksana secara efektif.

Tabel 3.7 Capaian IKU Persentase volume Penyaluran Biodiesel

BPDP	1b-CP Persentase Volume Penyaluran Biodiesel							
T/R	Q1	Q2	s.d. Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	Max/

BPDP	1b-CP Persentase Volume Penyaluran Biodiesel							TLK
Realisasi	24%	50,00%	50,00%	77,87%	77,87%	134%	134%	
Capaian	240,00%	166,67%	166,67%	129,78%	129,78%	134%	134%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Adapun rincian realisasi persentase volume penyaluran Biodiesel sebagaimana tercantum pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8 Rincian realisasi penyaluran Biodiesel

Tahun 2025	Volume Realisasi Penyaluran Biodiesel (Kilo liter)	Volume Dibayarkan (Kilo liter)	Pembayaran selisih HIP Biodiesel dengan HIP Solar (Rupiah)
Januari	1.053.134	672.650	3.720.804.775.869
Februari	1.152.535	1.139.201	6.464.156.755.878
Maret	1.260.461	1.267.197	8.052.919.008.624
April	1.204.803	195.566	1.220.803.986.748
Mei	1.191.904	616.960	3.477.706.854.321
Juni	1.240.886	646.235	3.638.822.104.424
Juli	1.208.549	518.072	3.001.196.642.657
Agustus	1.292.542	757.504	4.593.033.220.952
September	1.282.944	361.241	2.059.841.168.931
Oktober	1.309.992	1.036.910	5.704.357.411.698
November	1.327.647	253.989	1.372.880.484.502
Desember	1.415.333	648.478	3.702.254.657.801
Total	14.940.729	8.114.003	47.008.777.072.405

Extra effort yang dilakukan dalam pencapaian IKU ini:

- 1) Memastikan kecukupan pendanaan program mandatori biodiesel
 Dalam hal ini telah dilakukan penetapan tambahan alokasi berdasarkan Rapat Komite Pengarah di awal Semester II 2025. Untuk tahun anggaran 2025 Dana Biodiesel yang bisa dibayarkan sebesar Rp50,3 T, selebihnya akan di-*carry over* pada tahun anggaran 2026. Nilai pembayaran dana pembiayaan biodiesel untuk tahun 2025 sebesar Rp47,008 Triliun (termasuk Rp19,6 T yang merupakan *carry over* tahun 2024) untuk volume biodiesel yang dibiayai sebesar 8,11 Juta Kiloliter.
- 2) Memantau pergerakan HIP Solar dan HIP Biodiesel dan memastikan tetap *on track* sesuai prognosis
 Berdasarkan hasil monitoring, HIP Solar per liter menunjukkan dinamika pergerakan dengan nilai terendah Rp12.874,- dan nilai tertinggi sebesar Rp14.615,- dengan rata-rata berada pada Rp13.698,67. Untuk HIP Biodiesel per liter, nilai tertinggi tercatat

sebesar Rp9.577,78, sedangkan nilai terendah berada pada Rp8.049,03, dengan rata-rata Rp8.886,90. Adapun selisih HIP (Solar – Biodiesel) per liter bergerak dalam kisaran Rp3.686,00 hingga Rp5.802,16 dan secara keseluruhan rata-rata selisih HIP berada pada Rp4.811,77.

- 3) Melakukan Rekonsiliasi Data Penyaluran Biodiesel dengan Ditjen EBTKE, BUBBN, BUBBM dan Surveyor secara berkala.
- 4) Pembentukan Tim Evaluasi Pengadaan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Tahun Anggaran 2025 oleh Kementerian ESDM, dengan perwakilan BPDP sebagai anggota.

1c-CP Persentase jumlah orang/peserta program pengembangan SDM Perkebunan

1. Definisi dan Formula IKU

Indikator Persentase jumlah peserta Program Pengembangan SDM Perkebunan diukur berdasarkan capaian jumlah orang yang mengikuti program pendidikan dan pelatihan yang meliputi beasiswa pendidikan, vokasi, magang, pelatihan petugas/pendamping, pelatihan petani atau kelompok tani, serta koperasi.

Capaian indikator dihitung berdasarkan rata-rata realisasi jumlah peserta pengembangan SDM dibandingkan dengan target masing-masing pada kegiatan pendidikan dan pelatihan. Target total sebanyak 11.000 orang, dengan rincian peserta pendidikan sebesar 5.000 orang dan pelatihan sebesar 6.000 orang.

2. Capaian IKU

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, pelaksanaan program menunjukkan capaian yang melampaui target yang ditetapkan. Pada komponen pendidikan, jumlah peserta tercatat sebanyak 9.146 orang dari target 5.000 orang, yang terdiri atas 5.193 peserta lanjutan dari tahun sebelumnya dan 3.953 peserta baru. Selanjutnya, pada komponen pelatihan, realisasi peserta mencapai 10.786 orang dari target 6.000 orang, yang tersebar di 40 kabupaten pada 17 provinsi di seluruh Indonesia. Selain itu, penerimaan mahasiswa baru Tahun 2025 telah berjalan dengan mahasiswa aktif yang telah memulai perkuliahan sebanyak 3.955 orang dari rekomendasi teknis sebanyak 4.000 orang yang ditetapkan BPDP. Program ini dilaksanakan melalui 41 lembaga penyelenggara pendidikan yang tersebar di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

Tabel 3.9 Capaian Persentase Jumlah Orang/Peserta Program Pengembangan SDM Perkebunan

BPDP	1c-CP Persentase Jumlah Orang/Peserta Program Pengembangan SDM Perkebunan							
T/R	Q1	Q2	s.d. Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	10%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	47,53%	91,42%	91,42%	111,16%	111,16%	181%	181,34%	
Capaian	475,30%	182,84%	182,84%	148,21%	148,21%	181,34%	181,34%	

BPDP	1c-CP Persentase Jumlah Orang/Peserta Program Pengembangan SDM Perkebunan							
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Secara total, realisasi IKU Tahun 2025 mencapai 19.932 orang dari target 11.000 orang. Capaian tersebut terdiri atas program pendidikan sebanyak 9.146 orang dari target 5.000 orang dan program pelatihan sebanyak 10.786 orang dari target 6.000 orang. Dengan pembobotan seimbang antara komponen pendidikan dan pelatihan masing-masing sebesar 50%, diperoleh realisasi capaian IKU sebesar 181% yang menunjukkan bahwa target kinerja telah terlampaui.

Rincian penerima program pendidikan sebagai berikut:

Tabel 3.10 Rincian Jumlah Penerima Program Pendidikan SDM Perkebunan 2025

No.	Lembaga Pendidikan	Program	2021	2022	2023	2024	2025	Yang dikelola 2025
1	Poltek LPP Yogyakarta	D2		30	30	30	30	88
		D3	50	120	120	120	90	356
		D4	75	30	120	210	180	683
2	Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta (AKPY)	D1	250	310	440	570	490	1041
		D2	-	-	-	-	60	59
3	Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi (CWE)	D1	-	-	-	-	-	0
		D3	90	90	180	240	210	713
		D4	30	30	90	90	120	354
4	Politeknik Kampar	D2		30	30	30	30	88
		D3	80	90	150	210	150	584
		D4				30	60	89
5	Institut Teknologi Sawit Indonesia (ITSI)	D4	60	60	120	120	90	437
		S1		120	150	150	120	527
6	Institut Teknologi Sains Bandung (ITSB)	D3	25	30	0	30	60	110
7	Institut Pertanian Stiper (INSTIPER)	S1	-	60	120	120	150	441
8	Univ Prima	S1	-	-	30	90	90	208
9	Sekolah Vokasi (SV) IPB	D4	-	-	60			59
10	Politeknik ATI Padang	D3	-	-	120	150	180	439
		D4	-	-	30	30	30	87
11	Politeknik Teknologi Kimia Industri (PTKI) Medan	D3	-	-	90	90	150	315
12	Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbantan) Medan	D4	-	-	60	60	30	136
13	Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia (ITP2I)	S1	-	-	30	90	90	207

No.	Lembaga Pendidikan	Program	2021	2022	2023	2024	2025	Yang dikelola 2025
14	Politeknik Aceh	D3	-	-	30	90	150	261
15	Politeknik Aceh Selatan	D3	-	-	-	30	30	90
16	Politeknik ATI Makassar	D3	-	-	-	30	30	85
17	Politeknik Jambi	D3	-	-	-	60	60	177
18	Univ. Islam Sumut	S1	-	-	-	60	60	118
19	Universitas Koperasi Indonesia (IKOPIN)	S1	-	-	-	60	60	117
20	Politeknik Caltex Riau (PCR)	D4	-	-	-	60	60	179
21	Polban Manokwari	D4	-	-	-	30	30	59
22	Politeknik Indonesia Venezuela (Poliven)	D3	-	-	-	30	30	114
23	Univ. Pasir Pengaraian	S1	-	-	-	30	30	89
24	Sekolah Vokasi (SV) UNDIP	D4	-	-	-	60	60	119
25	Politeknik Bombana	S1	-	-	-	-	30	29
26	Politeknik Kutaraja	D4	-	-	-	-	30	30
27	Politeknik Negeri Lhokseumawe	D3	-	-	-	-	30	30
28	Poltan Negeri Samarinda	D3	-	-	-	-	60	59
		D4	-	-	-	-	30	30
29	Politeknik YKPN	D3	-	-	-	-	30	30
		D4	-	-	-	-	30	30
30	Univ. Borobudur	S1	-	-	-	-	60	60
31	Univ. Hasanuddin	S1	-	-	-	-	60	60
32	Univ. Jambi	D3	-	-	-	-	30	30
33	Univ. Lam. Mangkurat	S1	-	-	-	-	30	29
34	Univ. Lancang Kuning	S1	-	-	-	-	60	60
35	Univ. Muh. Sumbar	S1	-	-	-	-	30	30
36	Univ. Nadhaltul Ulama	S1	-	-	-	-	30	30
37	Univ. Sultra	S1	-	-	-	-	30	30
38	Univ. Taman Siswa Padang	S1	-	-	-	-	30	30
39	Univ. Teuku Umar	S1	-	-	-	-	30	30
40	Univ. Tjut Nyak Dhien	S1	-	-	-	-	30	30
41	Univ. Tunas Pembangunan	S1	-	-	-	-	30	30
42	Akademi Komunitas Industri Manufaktur (Akom) Bantaeng	D2	-	-	-	-	30	30
Jumlah			660	1.000	2.000	3.000	3.730	9.146

Sedangkan rincian penerima program pelatihan, sebagai berikut:

Tabel 3.11 Rincian Jumlah Penerima Program Pelatihan SDM Perkebunan 2025

No.	Nama Lembaga	Jumlah	Provinsi
1	Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) Ciawi	728	Riau, Sumsel, Bengkulu, Jambi, Kaltara
2	Balai Pelatihan Pertanian Jambi	634	Sumsel, Jambi
3	Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binnuang	81	Kalsel
4	Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku	59	Sulbar
5	PT. Sumberdaya Indonesia Berjaya	430	Kalbar, Kalteng dan Sulteng
6	PT. LPP Agro Nusantara	2.066	Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Kalsel, Sulbar, Sulteng dan Papua Barat
7	PT. Trifos Internasional Sertifikasi	63	Bengkulu
8	PT. Koompasia Enviro Institute	188	Sumut
9	PT. Menara Training Centre	71	Riau
10	PT. Forestcitra Sejahtera (Mutu Institute)	724	Sumsel dan Kaltim
11	PT. Global Scholarship Service (IPB Training)	1.405	Aceh, Riau, Sumsel, Banten dan Sulsel
12	PT. Best Planter Indonesia	1.135	Sumbar, Riau dan Sumsel,
13	PT. Riset Perkebunan Nusantara	479	Sumut, Riau, dan Kalsel
14	PT. Iskol Agridaya Internasional	316	Sumut, Sumbar, Riau, Jambi
15	PT. Daya Guna Lestari	371	Riau, Sumsel, Kaltara
16	PT. Citra Widya Education	454	Bengkulu dan Kaltim
17	Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta (AKPY)	1.492	Sumsel, Kalbar, Kalteng, Sulteng, dan Sulsel
18	PT. Titian Karsa Mandiri	90	Bengkulu, Banten
Total		10.786	

Extra effort yang dilakukan dalam pencapaian IKU ini:

- 1) Penandatanganan perjanjian swakelola tipe 2 dengan Ditjenbun no. PRJ-40.3/DPKS/Dit.IV/2025 tanggal 3 Maret 2025 tentang Dukungan Pendanaan Kegiatan Penyaluran Dana Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan Kelapa Sawit (SDM PKS).
- 2) Penandatanganan perjanjian kerja sama pelatihan Tahun 2025 dengan 18 Lembaga Penyelenggara Pelatihan pada tanggal 20 Mei 2025, termasuk detail pelaksanaan pada 40 Kabupaten di 17 Provinsi di Indonesia.
- 3) Penandatanganan perjanjian kerja sama pendidikan Tahun 2025 dengan 41 Lembaga Penyelenggara Pendidikan pada tanggal 19 Agustus 2025.

- 4) Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan SDM PKS 2025 dan Renstra Pengembangan SDM Perkebunan 2026 pada tanggal 28 Oktober 2025 bersama Ditjenbun, GAPKI, AGRINAS, PALMCO dan PHCA.
- 5) *Monitoring* swakelola tipe III dengan Ditjenbun terkait Dukungan Pendanaan Kegiatan Penyaluran Dana Pengembangan SDM PKS 2025 secara triwulanan.

1d-CP Tingkat kepuasan *stakeholder* dan pengguna layanan

1. Definisi dan Formula IKU

Pelaksanaan Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan dan Pengguna Layanan Kemenkeu (SKPKPL) merupakan tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kementerian Keuangan kepada masyarakat, pengguna layanan dan stakeholders.

Pada tahun 2025, IKU Tingkat Kepuasan *Stakeholder* dan Pengguna Layanan terdiri dari 4 komponen, yaitu:

- a. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan/Stakeholder (IKPK) – Target 4 skala 5
- b. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) – Target 4,36 skala 5
- c. Target Indeks Kepuasan pengguna layanan (Survey dilakukan BPDP) – Target 3,4 skala 4
- d. Tingkat Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi SKPL 2024 – Target 100%.

2. Capaian IKU

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris DJPb nomor ND-118/PB.1/2026 tanggal 9 Januari 2026 hal Koordinasi terkait Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Layanan dan Pemangku Kepentingan (SKPLPK) lingkup Kantor Pusat dan BLU DJPb Periode Triwulan IV Tahun 2025, s.d. Triwulan IV 205 BPDP mendapatkan realisasi IKPK sebesar 4,68 skala 5 (117%) dan realisasi IKPL sebesar 4,53 skala 5 (103,9%).

Hasil survei kepuasan pengguna layanan tahun 2025 yang dilakukan BPDP, realisasi sebesar 3,72 skala 4 (109,5%). Sedangkan tindak lanjut SKPL 2024, BPDP telah menyelesaikan 8 dari 8 (100%) rekomendasi SKPL 2024. Sehingga capaian total sebesar 107,58%.

Tabel 3.12 Capaian tingkat kepuasan *stakeholder* dan pengguna layanan

BPDP	1d-CP Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> dan pengguna layanan							
T/R	Q1	Q2	s.d. Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoU/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	107,58%	107,58%	
Capaian	100%	100%	100%	100%	100%	107,58%	107,58%	
Nilai Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	107,58%	107,58%	

Extra effort yang dilakukan dalam pencapaian IKU ini:

- 1) Berkoordinasi dengan *stakeholder* (Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian) dan penyedia aplikasi layanan BPDP serta kolaborasi dengan Setditjen dan Direktorat SITP untuk publikasi dalam rangka penyelesaian tindak lanjut SKPL tahun 2024;
- 2) Melaksanakan survei e-SKPL triwulanan yang dikelola oleh Biro Organta;
- 3) Melaksanakan survei kepuasan pengguna layanan tahun 2025 yang disusun oleh BPDP.

SS 2 Penyaluran dana perkebunan yang efektif

Dana Perkebunan harus disalurkan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel untuk mendukung pengembangan perkebunan berkelanjutan melalui pendanaan kegiatan pengembangan SDM, penelitian dan pengembangan, promosi, peremajaan, serta penyediaan sarana dan prasarana termasuk rangka pemenuhan hasil Perkebunan untuk kebutuhan pangan, bahan bakar nabati, dan hilirisasi industri Perkebunan sesuai ketentuan Perpres 132 Tahun 2024.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, BPDP mengidentifikasi 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel 3.13.

Tabel 3.13 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

SS 2: Penyaluran dana perkebunan yang efektif					
Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Nilai
2a-N	Persentase penyaluran dana peremajaan perkebunan rakyat	100%	84,91%	84,91%	84.91%
2b-N	Persentase penyaluran dana sarana dan prasarana perkebunan	100%	142%	142%	120.00%
2c-N	Persentase kualitas riset perkebunan yang dikelola	100%	131%	131%	120.00%

Uraian mengenai capaian IKU sebagai berikut:

2a-N Persentase penyaluran dana peremajaan perkebunan rakyat

1. Definisi dan Formula IKU

Persentase penyaluran dana PSR dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah rekomendasi teknis (rekomtek) dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian yang dananya telah disalurkan pada tahun 2025 dengan total rekomtek yang diterima oleh BLU BPDP, serta memperhitungkan capaian luasan lahan yang terealisasi.

Capaian IKU ini dihitung melalui berdasarkan dua komponen. Pertama, persentase jumlah rekomtek yang dananya telah disalurkan dibandingkan dengan total rekomtek yang diterima, dengan bobot 60%. Kedua, persentase capaian luasan lahan Tahun 2025 telah memperoleh persetujuan pembiayaan dibandingkan dengan target sebesar 70.000 hektar, dengan bobot 40%.

Pada akhir tahun 2025, terdapat persetujuan perubahan formula manual IKU Persentase Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Rakyat (Program PSR) berdasarkan nota dinas bersama antara Direktur PPKBLU dan Direktur SMI nomor ND-791/PB.5/2025 dan ND-1429/PB.4/2025. Perubahan formula tersebut karena indikator ini memiliki tingkat kendali yang rendah, antara lain karena proses pemenuhan rekomtek dari Ditjen Perkebunan sangat memengaruhi jumlah dan waktu penerimaan rekomtek, yang berdampak pada pencapaian target luasan lahan. Pokok perubahan terkait penyesuaian formula perhitungan IKU ini, dari sebelumnya berbasis rekomtek yang sudah disalurkan dananya menjadi berbasis rekomtek yang telah diterbitkan melalui Surat Keputusan Direktur Utama BPDP, sehingga indikator lebih berada dalam kendali organisasi.

Adapun tujuan IKU ini adalah untuk mendorong peremajaan kebun kelapa sawit guna mendukung keberlangsungan sawit dan industri pendukungnya di masa mendatang.

2. Capaian IKU

Pada tahun 2025, telah diterima total 275 Rekomtek dan telah tersalur 224 rekomtek seluas 36.169 Ha dan dalam proses penyaluran dana 51 rekomtek dengan luasan 7.421 Ha. Pada komponen penerbitan Surat Keputusan Direktur Utama (SK Dirut), realisasi mencapai 100% atau seluruh 275 SK yang ditargetkan berhasil diterbitkan. Pada komponen target luasan lahan, dari target 70.000 hektare telah terealisasi 43.490 hektare, atau setara 62,27%. Kombinasi capaian kedua komponen tersebut menghasilkan nilai akhir kinerja sebesar 84,91% yang berada di bawah target sebesar 100%.

Tabel 3.14 Capaian Persentase penyaluran dana peremajaan perkebunan rakyat

BPDP	2a-N Persentase penyaluran dana peremajaan perkebunan rakyat							
T/R	Q1	Q2	s.d. Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	60%	70%	70%	80%	80%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	66,73%	71,47%	71,47%	73,76%	73,76%	84,91%	84,91%	
Capaian	111,22%	102,09%	102,09%	92,22%	92,22%	84,91%	84,91%	
Nilai Kinerja	111,22%	102,09%	102,09%	92,22%	92,22%	84,91%	84,91%	

Adapun akar masalah ketidaktercapaian IKU ini adalah:

- 1) Masih tingginya harga tandan buah segar (TBS) sawit menimbulkan keengganan pekebun untuk mengusulkan peremajaan.
- 2) Maraknya penegakan hukum terhadap sejumlah kelembagaan pekebun yang dinilai bermasalah menimbulkan kekhawatiran di kalangan pekebun, sehingga menurunkan minat mengikuti Program PSR akibat kekhawatiran potensi pemeriksaan oleh aparat penegak hukum di kemudian hari.

- 3) Pemenuhan persyaratan dokumen pendukung masih memerlukan waktu yang cukup panjang, khususnya pada penerbitan surat keterangan bebas kawasan hutan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) dan surat keterangan bebas kawasan HGU oleh Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota.

Perhitungan detail rincian IKU ini sebagai berikut:

Tabel 3.15 Perhitungan IKU Penyaluran Dana PSR

Komponen	T	R	Indeks Capaian	Bobot	Realisasi
Penerbitan SK Dirut	100% (275)	100% (275)	100%	60%	84,91%
Capaian Target Luasan Lahan	70.000 ha	43.490 ha	62,27%	40%	

Extra effort yang dilakukan dalam pencapaian IKU ini:

- 1) Seluruh Bank Mitra BPDP telah berhasil memfasilitasi penerapan sistem *host to host* pada Februari 2025, dan selanjutnya akan memfasilitasi integrasi open API melalui sistem SNAP Bank Indonesia sebagai tahap penguatan interoperabilitas dan percepatan proses layanan.
- 2) Terus dilakukan koordinasi penyaluran peremajaan sawit rakyat tahun 2025 dengan Ditjenbun disertai dengan pelaksanaan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama 3 Pihak secara bulanan dengan target penyaluran bulanan.
- 3) PSR jalur Kemitraan terus diakselerasi, walaupun belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian PSR.

2b-N Persentase penyaluran dana sarana dan prasarana perkebunan

1. Definisi dan Formula IKU

Capaian IKU persentase penyaluran dana sarana dan prasarana perkebunan dihitung dengan membandingkan jumlah rekomendasi teknis (rekomtek) yang telah diterbitkan persetujuan pembiayaannya (berupa Surat Keputusan Direktur Utama) dengan total rekomtek Tahun 2025 yang diterima dari Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian. Adapun capaian tambahan dengan bobot maksimal 50% dihitung apabila terdapat penyelesaian kontrak untuk sarana dan prasarana dalam bentuk barang dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan setelah terbit persetujuan pembiayaan.

Adapun target penyelesaian sebesar 50 rekomtek dihitung secara proporsional. Tujuan IKU ini adalah untuk memberikan bantuan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit dalam upaya untuk meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu hasil perkebunan kelapa sawit.

2. Capaian IKU

Pada tahun 2025, telah diterima 78 Rekomtek dari Ditjen Perkebunan dengan rincian 73 rekomtek telah diterbitkan SK Dirut, 4 rekomtek dikembalikan, dan 1

dokumen berupa perbaikan rekomtek diterima pada 31 Desember 2025 dan akan diperhitungkan tahun 2026. Dari segi kecepatan, terdapat 30 dokumen kontrak pengadaan dalam bentuk barang yang diterbitkan kurang dari 3 bulan setelah terbit persetujuan pembiayaan dari total 36 dokumen SK Dirut dalam bentuk barang.

Tabel 3.16 Capaian Persentase penyaluran dana sarana dan prasarana perkebunan

BPDP	2b-N Persentase penyaluran sarana dan prasarana perkebunan							
T/R	Q1	Q2	s.d. Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoU/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	100%	100%	100%	142,3%	142,3%	141,67%	141,67%	
Capaian	100%	100%	100%	142,3%	142,3%	141,67%	141,67%	
Nilai Kinerja	100%	100%	100%	120%	120%	120%	120%	

Perhitungan detail rincian IKU ini sebagai berikut:

Tabel 3.17 Perhitungan IKU Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana Perkebunan

Komponen	T	R	Indeks Capaian	Bobot	Realisasi
Penerbitan persetujuan pembiayaan (SK Dirut)	100% (50)	100% (73)	100%	100%	141,67%
Kecepatan pembuatan kontrak pengadaan < 3 bulan	36 dokumen	30 dokumen	83,33%	50%	

Extra effort yang dilakukan dalam pencapaian IKU ini:

- 1) Koordinasi dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) BPDP terkait percepatan pengadaan barang untuk program Sarpras.
- 2) Koordinasi dengan Ditjenbun dalam rangka akselerasi Rekomendasi Teknis kegiatan Verifikasi Teknis / *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO).
- 3) Berpartisipasi pada kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Pertanian tentang ISPO.
- 4) Pembahasan konsep pembaruan Perdirut terkait Tata Cara Penyaluran dan Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.
- 5) Pembahasan secara intens dengan Ditjenbun dan tim ULP BPDP terkait akselerasi dan penyelesaian permasalahan atas program SPPKS.
- 6) Pembentukan Tim Percepatan Sertifikasi ISPO Pekebun yang telah ditetapkan pada Keputusan Direktur Utama BPDP nomor KEP-3/BPDP/2026.

2c-N Persentase kualitas riset perkebunan yang dikelola

1. Definisi dan Formula IKU

IKU Persentase Kualitas riset perkebunan yang dikelola merupakan penghitungan rata-rata realisasi jumlah riset yang dibiayai dan kualitas atas riset

yang telah dibiayai pada tahun berkenaan. Komponen jumlah riset dihitung berdasarkan jumlah kegiatan riset yang dibiayai pada tahun 2025, sedangkan komponen kualitas riset dihitung berdasarkan jumlah luaran atau kebermanfaatan hasil riset sawit yang telah didanai BPDP. Capaian perolehan jumlah riset, luaran, dan kebermanfaatan dihitung pada periode 1 Januari 2025 s.d 31 Desember 2025.

Adapun kriteria perhitungan kualitas riset sebagai berikut:

Tabel 3.18 Nilai kualitas luaran / kebermanfaatan riset

Uraian luaran / kebermanfaatan riset		Nilai
a.	Hasil penelitian yang dikomersialisasikan	10
b.	Hasil penelitian yang menghasilkan paten	5
c.	Hasil penelitian berupa artikel yang dipublikasikan di Jurnal Internasional bereputasi	3
d.	Hasil penelitian yang berupa dipublikasikan di Jurnal Nasional Terakreditasi/prosiding terindex/buku ber ISBN	2
e.	Hasil penelitian berupa artikel yang dipublikasikan di Jurnal Internasional	1,5
f.	Hasil penelitian berupa artikel dipublikasikan di jurnal nasional	1

Target jumlah riset yang ditetapkan sebesar 100 riset, dengan target kualitas riset ditetapkan sebesar 150 poin yang berasal dari kualitas riset tahun sebelumnya. Adapun IKU ini bertujuan untuk mendukung penelitian dan pengembangan perkebunan serta industri pendukungnya yang terintegrasi dan berkelanjutan.

2. Capaian IKU

Sampai dengan Triwulan IV 2025, BPDP mengelola sebanyak 147 riset dari target 100 riset (147%), dengan rincian:

- a. 13 Penelitian dari riset tahun 2022 (kelompok GRS K22);
- b. 31 Penelitian dari riset tahun 2023 (kelompok GRS K23);
- c. 52 Penelitian dari riset tahun 2024 (kelompok GRS K24);
- d. 10 Riset inisiatif dari Kementerian anggota Komite Pengarah, yaitu: Uji B40 Non Otomotif (Kementerian ESDM), Eksplorasi Genetik di Tanzania (Kementan), Standar dan Mutu B50 (Kementan), Supply Demand B50 (Kementan), Serangga Penyerbuk (Kementan), Agroindustri Kepala Sawit (Kementan), Efektivitas Pupuk Hayati (Kementan), Life Cycle Asessment Biodiesel (Kemen. ESDM), Fleksibilitas Blending Biodiesel (Kemenko Ekon), dan Uji B50 (Kemen. ESDM);
- e. 1 Riset inisiatif internal BPDP yaitu: Bensin Sawit dan Minyak Makan Sehat dengan LPIK ITB; dan
- f. 40 Penelitian Lomba Riset Mahasiswa 2025.

Dari segi kualitas luaran atau kebermanfaatan riset, diperoleh nilai 173,5 poin dari target 150 poin (115,67%), sebagai berikut:

- a. Komersialisasi **100** poin;

- b. Paten/Lol/NDA **23** poin;
- c. Jurnal Internasional Terindeks: **36** poin;
- d. Buku: **8** poin;
- e. Jurnal Internasional: **4,5** poin; dan
- f. Jurnal Nasional: **2** poin.

Tabel 3.19 Capaian Persentase kualitas riset perkebunan yang dikelola

BPDP	2c-N Persentase kualitas riset perkebunan yang dikelola							
T/R	Q1	Q2	s.d. Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	40%	84,33%	84,33%	106,33%	106,33%	131,33%	131,33%	
Capaian	160%	168%	168%	141,77%	141,77%	131,33%	131,33%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Extra effort yang dilakukan dalam pencapaian IKU ini:

- 1) Penjaringan proposal riset melalui *Call for Proposal* Grant Riset Sawit (GRS) 2025 dan Lomba Riset Sawit Tingkat Mahasiswa 2025. Jumlah proposal yang masuk meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, mencerminkan efektivitas sosialisasi BPDP melalui rangkaian webinar dan program *coaching* riset.
- 2) Penandatanganan perjanjian kerja sama untuk 10 riset inisiatif dari Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, dan Kemenko Perekonomian.
- 3) Pembahasan 6 usulan riset inisiatif baru dari Kementerian Pertanian.
- 4) Penandatanganan perjanjian kerja sama usulan riset inisiatif Kementerian ESDM terkait Uji Jalan B50 di sektor Otomotif dan Non Otomotif.

SS 3 Pencapaian tugas khusus (*special mission*) yang efektif

Kementerian Keuangan memiliki *Special Mission Vehicle* (SMV) berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) Pengelola Dana yang diberikan kewenangan tertentu untuk dapat berinvestasi baik jangka pendek maupun jangka panjang sesuai dengan penugasan masing-masing. Sasaran ini bertujuan untuk memastikan setiap tugas khusus yang bersifat strategis, mendesak, atau prioritas tinggi dapat dilaksanakan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan berkualitas. Efektivitas pelaksanaan tugas khusus mencerminkan kesiapan organisasi dalam merespons kebutuhan dinamis, instruksi pimpinan, dan situasi luar biasa secara profesional, terkoordinasi, dan terukur. Keberhasilan sasaran ini menunjukkan kinerja institusi yang adaptif, sigap, dan andal dalam mendukung tujuan nasional maupun instansi.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, BPDP mengidentifikasi 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel 3.20.

Tabel 3.20 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

SS 3: Pencapaian tugas khusus (<i>special mission</i>) yang efektif					
Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Nilai
3a-CP	Tingkat maturitas BLU	3	3	100%	100%
3b-N	Persentase tingkat harga CPO	100%	126%	126%	120%
3c-N	Indeks akurasi proyeksi pendapatan dan belanja BLU	3,5	4,97	142%	120%

Uraian mengenai capaian IKU sebagai berikut:

3a-CP Tingkat maturitas BLU

1. Definisi dan Fomula IKU

BLU *Maturity Rating* merupakan sebuah kerangka penilaian yang berfokus pada *process and performance improvement* dengan 5 (lima) level maturitas yang masing-masing level memiliki basis kinerja yang berlaku secara universal untuk seluruh aspek dan indikator penilaian.

Penilaian *Maturity Rating* dilakukan melalui aplikasi BLU *Integrated Online System* (BIOS) yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Target kinerja peningkatan *Maturity Rating* ditetapkan pada Indeks 3, yang diartikan bahwa tercapainya peningkatan nilai *maturity rating* antara 0,09 s.d. 0,12 pada tahun berkenaan dibandingkan periode sebelumnya. Hasil akhir penilaian *maturity rating* tersebut berdasarkan ketetapan akhir dari Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

IKU ini dimaksudkan untuk mendorong *continuous improvement* atas proses dan kegiatan operasional BLU sehingga berpengaruh positif pada pemberian layanan yang dilakukan oleh BLU.

2. Capaian IKU

Pada Triwulan II 2025, BPDP telah menyampaikan hasil *self-assessment Maturity Rating* pada aplikasi BIOS dengan nilai 3,95 atau meningkat 0,57 dari nilai penetapan tahun sebelumnya sebesar 3,38 (Indeks 5). Selanjutnya, pada Triwulan III 2025, dilakukan reviu oleh Kanwil DJPb yang menghasilkan catatan perbaikan atas pengisian *self-assessment maturity rating*.

Pada Triwulan IV 2025, telah dilaksanakan proses validasi *Maturity Rating* oleh Direktorat PPKBLU dengan hasil akhir sebesar 3,48. Nilai tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 0,10 dibandingkan periode sebelumnya, sehingga capaian berada pada Indeks 3 (0,09 – 0,12). Terdapat penurunan sebesar 0,47 antara hasil *self-assessment* awal dan hasil akhir validasi sebagai dampak penyesuaian

berdasarkan hasil revidasi dan validasi. Namun demikian, target peningkatan *Maturity Rating* tetap tercapai sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Tabel 3.21 Capaian Tingkat Maturitas BLU

BPDP	3a-CP Tingkat Maturitas BLU							
T/R	Q1	Q2	s.d. Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	3	3	3	3	3	3	3	Max/ TLK
Realisasi	3	5	5	5	5	3	3	
Capaian	100,00%	166,67%	166,67%	166,67%	166,67%	100,00%	100,00%	
Nilai Kinerja	100%	120%	120%	120%	120%	100%	100%	

Extra effort yang dilakukan dalam pencapaian IKU ini dilakukan dengan pembentukan tim *maturity rating* sesuai Keputusan Direktur Utama Nomor KEP-311/DPKS/2025 tahun 2025. Rencana aksi ke depan dalam pencapaian target IKU ini dengan melakukan evaluasi hasil *maturity rating* periode berkenaan sebagai dasar pengisian periode berikutnya dengan pembina BLU BPDP.

3b-N Persentase tingkat harga CPO

1. Definisi dan Formula IKU

IKU persentase tingkat harga CPO merupakan rata-rata harga CPO yang mempengaruhi harga TBS yang masih menguntungkan bagi pekebun kelapa sawit, untuk periode pengukuran tanggal 1 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025.

IKU ini dihitung dengan berdasarkan rata-rata harga CPO tahunan berdasarkan referensi Kementerian Perdagangan, yang diperoleh dari perhitungan rata-rata harga referensi CPO bulanan Tahun 2025 dibandingkan dengan target harga CPO, dinyatakan dalam persentase. Adapun tujuan IKU ini adalah untuk mendukung peningkatan harga CPO yang dapat berimbang pada peningkatan penerimaan dana BLU dari pungutan ekspor dan peningkatan harga tandan buah segar (TBS) untuk kesejahteraan pekebun. Target IKU ditetapkan sebesar US\$750 / Metrik Ton.

2. Capaian IKU

Realisasi harga rata-rata CPO Referensi Kemendag Periode sampai dengan Triwulan IV 2025 sebesar US\$942,42/MT, dengan target US\$750/MT sehingga realisasi capaian kinerja IKU ini sebesar 125,64%.

Tabel 3.22 Capaian Persentase tingkat harga CPO

BPDP	3b-N Persentase tingkat harga CPO							
T/R	Q1	Q2	s.d. Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	750	750	750	750	750	750	750	Max/ Average
Realisasi	989,83	914,13	951,98	914,50	939,48	941,17	942,33	

BPDP	3b-N Persentase tingkat harga CPO						
	Capaian	131,98%	121,88%	126,93%	125,25%	125,26%	126,82%
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Fluktuasi harga CPO yang terjadi selama Triwulan IV hingga Desember 2025 tidak lepas dari berbagai faktor eksternal dan perkembangan Industri domestik:

- 1) Meskipun curah hujan mulai pulih, produksi CPO masih tertekan karena dampak tertunda El Niño yang menyebabkan rendemen rendah dan pemulihan produktivitas yang lambat, sehingga pasokan global tetap terbatas.
- 2) Produksi sawit belum sepenuhnya pulih, sementara India, Tiongkok, dan Uni Eropa meningkatkan impor untuk kebutuhan pangan, industri, dan biodiesel menjelang akhir tahun, sehingga menciptakan pasar yang ketat dan mendorong harga naik.
- 3) Harga *Brent* stabil pada kisaran US\$85–90/barel akibat pengendalian produksi OPEC+ dan ketegangan geopolitik, membuat biodiesel lebih kompetitif dibandingkan solar fosil dan meningkatkan permintaan terhadap CPO sebagai *feedstock*.
- 4) Gangguan pasokan di Laut Hitam dan menurunnya ekspor minyak nabati dari Amerika Selatan menyebabkan harga minyak kedelai, bunga matahari, dan *rapeseed* naik, menciptakan *spillover effect* yang turut mendorong kenaikan harga CPO.

Adapun data harga CPO referensi Kemendag tahun 2025 per bulan sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.23.

Tabel 3.23 Tingkat Harga CPO Tahun 2025

No.	Bulan	Harga CPO (US\$)
1.	Januari	1.059,54
2.	Februari	955,44
3.	Maret	954,5
4.	April	961,54
5.	Mei	924,46
6.	Juni	856,38
7.	Juli	877,89
8.	Agustus	910,91
9.	September	954,71
10.	Oktober	963,61
11.	November	963,75

No.	Bulan	Harga CPO (US\$)
12.	Desember	926,14
Rata-rata harga CPO Tahun 2025		942,41

Extra effort yang dilakukan dalam pencapaian IKU ini dilakukan dengan monitoring pergerakan harga serta memutakhirkan data harga CPO dan minyak nabati lainnya sebagai referensi untuk melakukan proyeksi harga CPO tersebut.

3c-N Indeks akurasi proyeksi pendapatan dan belanja BLU

1. Definisi dan Formula IKU

Proyeksi pendapatan dan belanja BLU mendukung pengelolaan keuangan yang terintegrasi dan efisien untuk mencapai tujuan pelayanan publik yang optimal. Proyeksi ini membantu dalam penyusunan perencanaan yang lebih akurat, termasuk alokasi sumber daya yang sesuai.

Proyeksi pendapatan dilakukan dengan cara mengidentifikasi sumber pendapatan yang potensial, melakukan analisis tren historis dan pasar, serta memperkirakan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, proyeksi belanja dilakukan dengan mengestimasi kebutuhan operasional, pengembangan layanan, dan investasi strategis berdasarkan volume layanan dan prioritas yang telah ditetapkan. Kedua aspek ini saling mendukung untuk memastikan BLU dapat mencapai target kinerja yang diharapkan secara berkelanjutan.

Indeks akurasi proyeksi pendapatan dan belanja memperhitungkan rata-rata komponen ketepatan waktu penyampaian (bobot 40%) dan akurasi proyeksi pengesahan pendapatan dan belanja (bobot 60%). Target Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan BLU sebesar 3,5 (skala 5), dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.24 Kriteria ketepatan waktu penyampaian data

Kriteria Pengiriman Data Proyeksi ke Dit. PPKBLU (40%)	
Indeks 5	Data dikirimkan s.d tanggal 3 bulan berkenaan
Indeks 4,5	Data dikirimkan pada tanggal 4 bulan berkenaan
Indeks 4	Data dikirimkan pada tanggal 5 bulan berkenaan
Indeks 3,5	Data dikirimkan pada tanggal 6 bulan berkenaan
Indeks 3	Data dikirimkan pada tanggal 7 bulan berkenaan
Indeks 2,5	Data dikirimkan pada tanggal 8 bulan berkenaan
Indeks 2	Data dikirimkan pada tanggal 9 bulan berkenaan
Indeks 1,5	Data dikirimkan pada tanggal 10 bulan berkenaan
Indeks 1	Data dikirimkan pada tanggal 11 bulan berkenaan

Tabel 3.25 Kriteria deviasi rencana dan realisasi pengesahan

Kriteria % Deviasi antara Rencana dan Realisasi Pengesahan (60%)	
Indeks 5	% deviasi 0% s.d 3%
Indeks 4,5	% deviasi 3,01% s.d 5%

Kriteria % Deviasi antara Rencana dan Realisasi Pengesahan (60%)	
Indeks 4	% deviasi 5,01% s.d 7%
Indeks 3,5	% deviasi 7,01% s.d 10%
Indeks 3	% deviasi 10,01% s.d 12,5%
Indeks 2,5	% deviasi 12,51% s.d 15%
Indeks 2	% deviasi 15,01 s.d % 17,5%
Indeks 1,5	% deviasi 17,51% s.d 20%
Indeks 1	% deviasi lebih dari 20%

2. Capaian IKU

Sampai dengan Triwulan IV 2025, capaian tahunan atas IKU Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan dan Belanja BLU rata-rata sebesar 4,97 atau masuk kategori nilai indeks 5,00, dengan capaian sebesar 120%.

Tabel 3.26 Capaian Persentase tingkat harga CPO

BPDP	3c-N Indeks akurasi proyeksi pendapatan dan belanja BLU							
T/R	Q1	Q2	s.d. Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	Max/ Average
Realisasi	4,93	5,00	4,96	5	4,97	5,00	4,97	
Capaian	140.86%	142.86%	141.71%	142.86%	142.00%	142.86%	140,86%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Adapun data ketepatan waktu penyampaian data dan akurasi proyeksi pengesahan pendapatan dan belanja per bulan sebagaimana tercantum pada tabel 3.27.

Tabel 3.27 Rekapitulasi Data Ketepatan Waktu Penyampaian dan Akurasi Proyeksi

Bulan	Penyampaian Data	Indeks Penyampaian (40%)	Deviasi Proyeksi Pendapatan	Deviasi Proyeksi Belanja	Indeks Deviasi (60%)	Capaian IKU
Januari	3-Jan-2025	5	0.00%	0.00%	5	5
Februari	4-Feb-2025	4.5	0.11%	0.59%	5	4.8
Maret	3 Mar 2025	5	0.00%	0.18%	5	5
April	8 Apr 2025	5	2.17%	0.00%	5	5
Mei	2 Mei 2025	5	0.04%	0.00%	5	5
Juni	2 Jun 2025	5	0.00%	0.00%	5	5
Juli	2 Jul 2025	5	0.00%	0.00%	5	5
Agustus	2 Agt 2025	5	0.00%	0.00%	5	5
September	2 Sep 2025	5	0.00%	0.00%	5	5
Oktober	2 Okt 2025	5	0.00%	0.03%	5	5
November	3 Nov 2025	5	0.00%	0.00%	5	5
Desember	3 Des 2025	4.5	0.00%	0.00%	5	4.8
Rata-Rata Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan dan Belanja BLU						4,97

Extra effort yang dilakukan dalam pencapaian IKU ini berupa:

- 1) Secara aktif berkoordinasi dengan Pembina teknis satker BPDP terkait proses penilaian kinerja akurasi proyeksi pengesahan pendapatan dan belanja BLU.
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pada sistem aplikasi terkait proyeksi yang telah ditetapkan dan realisasi yang akan dilakukan pengesahan.

SS 4 Penghimpunan dan pengembangan dana perkebunan yang optimal

Penghimpunan dan Pengembangan Dana perkebunan harus optimal agar dapat dikelola untuk meningkatkan nilai tambah dari dana penghimpunan dan pengembangan yang ada dalam rangka mendukung tujuan penggunaan dana sesuai amanat Perpres 132 tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, BPDP mengidentifikasi 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel 3.28.

Tabel 3.28 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

SS 4: Penghimpunan dan pengembangan dana perkebunan yang optimal					
Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Nilai
4a-CP	Tingkat Imbal Hasil Pengelolaan Dana dan Kas	100%	125,89%	125,89%	120%
4b-N	Persentase Penghimpunan Dana	100%	112,69%	112,69%	112,69%

Perhitungan detail rincian IKU ini sebagai berikut:

4a-CP Tingkat Imbal Hasil Pengelolaan Dana dan Kas

1. Definisi dan Formula IKU

Kementerian Keuangan memiliki *Special Mission Vehicle* (SMV) berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) Pengelola Dana yang diberikan kewenangan tertentu untuk dapat berinvestasi baik jangka pendek maupun jangka panjang sesuai dengan penugasan masing-masing. Indikator kinerja ini digunakan untuk mengetahui imbal hasil yang diperoleh pemerintah dari berbagai investasi yang dilakukan oleh BLU.

Pengukuran hanya pada imbal hasil yang diperoleh pada tahun berjalan dan diukur secara *take last known value* (TLKV) karena perolehan imbal hasil belum tentu didapat secara rutin pada periode triwulanan, khususnya yang berupa jangka panjang.

Penghitungan capaian kinerja tingkat imbal hasil pengelolaan dana dan kas berdasarkan *Return on Investment* (RoI) investasi jangka pendek dan jangka panjang menggunakan data *outstanding investment* dengan basis akrual. Nilai

rata-rata investasi dihitung menggunakan metode rata-rata geometrik, dengan total imbal hasil sebagai pembilang utama dalam penentuan Rol. Proporsi investasi jangka panjang mengacu pada sumber dana sesuai Pernyataan Kebijakan Investasi Pemerintah (PKIP), sedangkan proporsi investasi jangka pendek ditetapkan dari sumber dana di luar ketentuan tersebut yang ditempatkan pada instrumen investasi.

Realisasi kinerja dilakukan dengan membandingkan rata-rata tertimbang dari Rol investasi jangka pendek terhadap rata-rata BI Rate periode pelaporan ditambah 0,5% dan Rol investasi jangka panjang terhadap SUN seri *Benchmark* tenor 5 tahun ditambah 0,15% berdasarkan kuotasi harian Surat Utang Negara yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan.

2. Capaian IKU

Kinerja pengelolaan dana dan investasi pada Badan Pengelola Dana Perkebunan tahun 2025 menunjukkan kinerja yang positif dan melampaui target acuan yang ditetapkan. Realisasi *annualized weighted average return on investment* (Rol) investasi jangka pendek per 31 Desember 2025 tercatat sebesar 7,43% per tahun, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata tingkat BI Rate sebesar 5,27% yang mencerminkan optimalisasi pengelolaan dana pada instrumen investasi jangka pendek.

Sementara itu, investasi jangka panjang juga mencatatkan kinerja yang optimal dengan realisasi Rol sebesar 7,32% per tahun, melampaui rata-rata *yield* Surat Utang Negara (SUN) seri *benchmark* tenor 5 tahun sebesar 6,17%. Capaian ini menunjukkan efektivitas strategi penempatan dana BPDP pada instrumen obligasi jangka panjang yang mampu memberikan imbal hasil kompetitif di tengah dinamika pasar keuangan.

Capaian IKU tersebut sebagai berikut:

Tabel 3.29 Capaian Tingkat Imbal Hasil Pengelolaan Dana dan Kas

BPDP	4a-CP Tingkat Imbal Hasil Pengelolaan Dana dan Kas							
T/R	Q1	Q2	s.d. Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	115,74%	124,45%	124,45%	126,32%	126,32%	125,89%	125,89%	
Capaian	115,74%	124,45%	124,45%	126,32%	126,32%	125,89%	125,89%	
Nilai Kinerja	115,74%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Perhitungan imbal hasil portofolio dana investasi sebagai berikut:

No.	Uraian	Pendapatan s.d Desember 2025		
1	Bunga Deposito	Rp	1,111,782,196,279	
2	Kupon Obligasi	Rp	392,665,209,109	
3	Capital Gain Obligasi	Rp	7,212,849,695	
	Jumlah Total	Rp	1,511,660,255,082	
No	Saldo Akhir	Deposito	Obligasi	Total
1	Januari 2025	Rp 27,095,000,000,000	Rp 5,440,743,000,000	Rp 32,535,743,000,000
2	Februari 2025	Rp 22,140,000,000,000	Rp 5,830,743,000,000	Rp 27,970,743,000,000
3	Maret 2025	Rp 16,045,000,000,000	Rp 5,860,743,000,000	Rp 21,905,743,000,000
4	April 2025	Rp 16,075,000,000,000	Rp 5,480,043,000,000	Rp 21,555,043,000,000
5	Mei 2025	Rp 14,975,000,000,000	Rp 5,226,237,000,000	Rp 20,201,237,000,000
6	Juni 2025	Rp 13,435,000,000,000	Rp 5,355,838,000,000	Rp 18,790,838,000,000
7	Juli 2025	Rp 13,891,000,000,000	Rp 5,355,838,000,000	Rp 19,246,838,000,000
8	Agustus 2025	Rp 12,916,000,000,000	Rp 5,331,838,000,000	Rp 18,247,838,000,000
9	September 2025	Rp 12,831,000,000,000	Rp 5,428,838,000,000	Rp 18,259,838,000,000
10	Oktober 2025	Rp 10,916,000,000,000	Rp 5,428,838,000,000	Rp 16,344,838,000,000
11	November 2025	Rp 11,336,000,000,000	Rp 5,428,838,000,000	Rp 16,764,838,000,000
12	Desember 2025	Rp 11,986,000,000,000	Rp 5,428,838,000,000	Rp 17,414,838,000,000
	Rata-Rata	Rp 14,752,766,622,077	Rp 5,463,516,590,778	Rp 20,332,396,621,238

Tabel 3.30 Dana Kelolaan Imbal Hasil Portofolio Dana Investasi

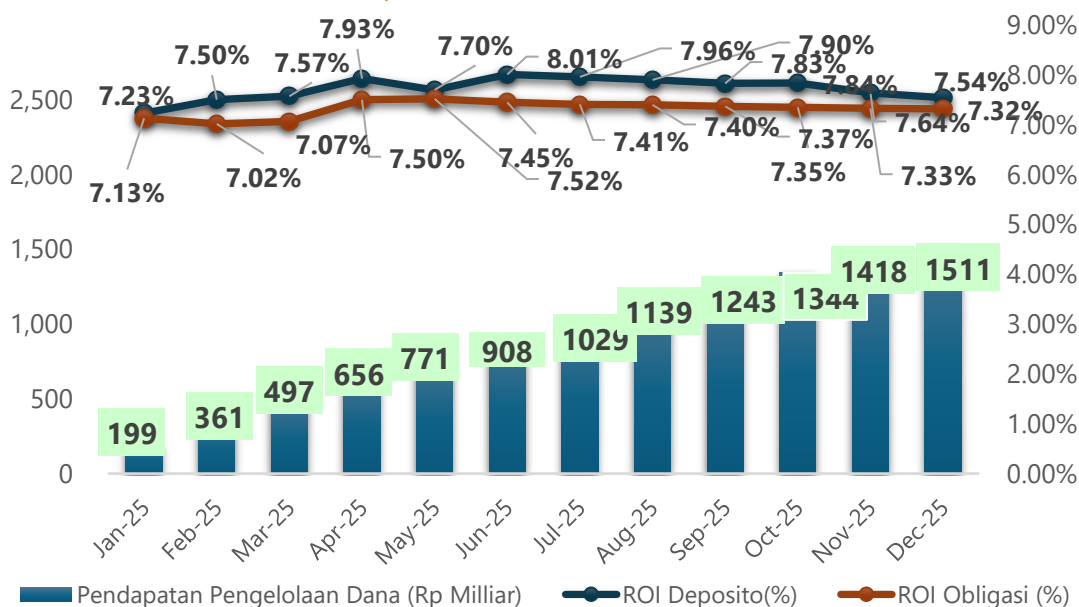
Selama periode sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, rata-rata dana investasi tercatat sebesar Rp20,33 triliun, yang terdiri atas penempatan pada Deposito sebesar Rp14,75 triliun dan Obligasi sebesar Rp5,46 triliun. Komposisi portofolio tersebut disusun secara proporsional untuk menjaga keseimbangan antara likuiditas dan optimalisasi imbal hasil.

Dari pengelolaan investasi tersebut, total pendapatan pengelolaan dana yang berhasil dibukukan mencapai Rp1,51 triliun, dengan kontribusi pendapatan dari investasi jangka pendek sebesar Rp1,10 triliun dan dari investasi jangka panjang sebesar Rp399,88 miliar. Pendapatan ini mencerminkan hasil pengelolaan dana Perkebunan yang efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan capaian tersebut, realisasi kinerja tingkat imbal hasil pengelolaan dana dan kas sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai 125,89%, yang menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan dana telah melampaui target yang ditetapkan dan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi BPDP dalam memenuhi kebutuhan operasional dan pendanaan program layanan sesuai mandat yang telah ditetapkan.

Pendapatan dan Persentase Imbal hasil dana kelolaan sampai dengan 31 Desember 2025, sebagai berikut:

Gambar 3.1 Grafik Pendapatan dan Persentase Imbal Hasil Dana Kelolaan



Extra effort yang dilakukan dalam pencapaian IKU ini berupa:

- 1) *Monitoring* rapat *Federal Open Market Committee (FOMC)* dan penetapan suku bunga 7-days REPO rate BI.
- 2) *Daily monitoring SUN market price* serta pergerakan YTM melalui Bloomberg.
- 3) Penyusunan Laporan Monitoring Investasi Obligasi BPDP.

4b-N Persentase Penghimpunan Dana

1. Definisi dan Formula IKU

Persentase dana pendapatan adalah tercapainya pendapatan dana perkebunan yang dilakukan melalui pengumpulan pungutan atas ekspor kelapa sawit dan/atau produk turunannya. Persentase penghimpunan dana dihitung dengan membandingkan antara realisasi dengan target pungutan ekspor untuk periode pengukuran tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2025.

Target yang digunakan adalah nilai pendapatan pungutan ekspor komoditas kelapa sawit yang lebih tinggi antara target yang ditetapkan oleh Komrah, target DIPA, RBA Definitif/Revisi atau penetapan dari Pembina Teknis/Keuangan Tahun 2025. IKU ini bertujuan untuk mencapai optimalisasi penghimpunan/pendapatan dana BPDP.

2. Capaian IKU

Jumlah penerimaan Pungutan Ekspor sampai dengan Desember 2025 sebesar Rp31,51 Triliun, sedangkan target PE pada RBA (target tertinggi) sebesar Rp27,96T. Pelunasan atas penagihan kurang bayar pungutan ekspor s.d. Desember 2025 sebesar Rp67,86 Miliar, sedangkan restitusi sebesar Rp4,9 Miliar. Berdasarkan data tersebut, maka realisasi persentase penghimpunan dana sebesar 112,69%.

Tabel 3.31 Capaian Persentase Penghimpunan Dana

BPDP	4c-CP Persentase Penghimpunan Dana							PoI/KP
	T/R	Q1	Q2	s.d. Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	40.05%	54%	54%	97.19%	97.19%	112,69%	112,69%	
Capaian	400%	180%	180%	162%	162%	112,69%	112,69%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	112,69%	112,69%	

Pendapatan Dana Pungutan Ekspor sepanjang tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 3.32 Pendapatan Pungutan Ekspor Tahun 2025

Bulan	Pungutan Ekspor (Rp)	Pelunasan Kurang Bayar (Rp)	Restitusi (Rp)	Total (Rp)
Januari	1.330.892.796.000	166.178.000	1.777.552.000	1.329.281.422.000
Februari	2.004.245.034.000	2.019.141.000	37.962.000	2.006.226.213.000
Marer	1.970.399.316.000	4.986.455.000	-	1.975.385.771.000
April	1.148.084.904.000	55.783.336.000	-	1.203.868.240.000
Mei	2.135.138.550.000	115.953.000	265.117.000	2.134.989.386.000
Juni	3.685.555.116.251	3.061.000	689.875.000	3.684.868.302.251
Juli	3.728.282.616.000	514.000	-	3.728.283.130.000
Agustus	3.787.310.165.603	27.172.000	1.195.336.000	3.786.142.001.603
September	2.272.321.507.000	160.277.000	102.171.000	2.272.379.613.000
Oktober	3.015.672.346.000	184.271.000	77.792.000	3.015.778.825.000
November	2.214.403.326.000	755.729.000	-	2.215.159.055.000
Desember	4.150.131.816.371	3.624.833.000	732.244.000	4.153.024.405.371
Total	31.442.437.493.225	67.826.920.000	4.878.049.000	31.505.386.364.225

SS 5 Komunikasi publik dan kerja sama yang efektif

Penyampaian informasi ke *stakeholder* dan masyarakat tentang fakta objektif kelapa sawit dan program-program Badan Pengelola Dana Perkebunan dalam mendukung pencapaian kelapa sawit yang berkelanjutan dalam rangka peningkatan citra nilai produk sawit serta sebagai sarana *branding* BPDP. Kegiatan komunikasi dilakukan secara tepat sasaran dan menggunakan media komunikasi yang efisien dan efektif mencapai sasaran dan tujuan. Untuk itu, kegiatan promosi perlu dilakukan dengan menjalin kemitraan/hubungan kelembagaan dengan Kementerian/Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan, Asosiasi Sawit, Perusahaan, Petani, UKM, Koperasi, dan badan hukum lainnya. Kemitraan tersebut juga akan memperluas capaian sasaran dari kegiatan promosi.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, BPDP mengidentifikasi 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel 3.33.

Tabel 3.33 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5

SS 5: Komunikasi publik dan kerja sama yang efektif					
Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Nilai
5a-N	Persentase efektivitas program promosi dan kerja sama	100%	143%	143%	120%
5b-N	Persentase penyelesaian kerja sama dalam rangka perluasan pasar ekspor perkebunan	100%	222%	222%	120%

Perhitungan detail rincian IKU ini sebagai berikut:

5a-N Persentase efektivitas program promosi dan kerja sama

1. Definisi dan Formula IKU

Persentase efektivitas program promosi dan kerja sama mengukur efektivitas program promosi dan kerja sama secara kuantitatif dan kualitatif.

Formula IKU ini dihitung berdasarkan tiga variabel: Persentase Kuantitas Kegiatan dan Sasaran Promosi (40%), Persentase Kualitas Pengelolaan Informasi Perkebunan 40%), dan rata-rata tingkat pemahaman peserta kegiatan promosi (20%). Tujuan IKU ini adalah untuk mengukur pengaruh kegiatan promosi dan kerja sama dalam meningkatkan citra dan persepsi positif terhadap sawit di media massa dan masyarakat di dalam negeri.

2. Capaian IKU

Capaian Persentase efektivitas program promosi dan kerja sama Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.34 Capaian Persentase efektivitas program promosi dan kerja sama

BPDP	5a-N Persentase efektivitas program promosi dan kerja sama							
T/R	Q1	Q2	s.d. Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	136,66%	143,21%	143,21%	142,62%	142,62%	143,08%	143,08%	
Capaian	136,66%	143,21%	143,21%	142,62%	142,62%	143,08%	143,08%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Adapun rincian pada masing-masing variabel sebagai berikut:

Capaian kuantitas kegiatan dan sasaran promosi mencapai 150% dari target. Dari target 100 kegiatan promosi, telah terealisasi 165 kegiatan yang terdiri atas 111 kegiatan eksternal dan 54 internal. Sementara itu, sasaran promosi dari target 10.000 orang, realisasinya berhasil menjangkau 32.485 orang melalui berbagai kanal *offline* dan *online*.

Tabel 3.35 Realisasi kegiatan dan sasaran promosi dan kerja sama

Uraian (max. 50%)	Target	Realisasi	Capaian	Bobot	Capaian akhir
Keg. Inisiatif Eksternal	75	113	150%	30%	50%
Keg. Inisiatif Internal	25	45	180%	40%	50%
Sasaran promosi	10.000	32.485	324%	30%	50%
Capaian akhir					150%

Capaian kualitas pengelolaan informasi mencapai 150% dari target. Persentase persepsi positif media massa yang ditetapkan sebesar 70% berhasil melampaui target dengan realisasi 77,16%. Selain itu, indikator *engagement rate* juga menunjukkan hasil yang sangat tinggi, yaitu 226,68% jauh di atas target sebesar 40%.

Tabel 3.36 Realisasi kualitas pengelolaan informasi

Uraian (max. 75%)	Target	Realisasi	Capaian	Bobot	Capaian akhir
<i>Engagement Rate</i>	40%	226%	566%	30%	75%
Persepsi positif media	70%	77,16%	110%	70%	75%
Capaian akhir					150%

Rata-rata Tingkat Pemahaman Peserta Kegiatan Promosi sebesar 115,41% dengan sampling *post test* dari kegiatan promosi yang dilaksanakan Direktorat Hukum dan Kerja Sama periode s.d. Desember 2025.

Tabel 3.37 Realisasi tingkat pemahaman peserta

Uraian (max. 150%)	Target	Realisasi	Capaian	Bobot	Capaian akhir
Tingkat Pemahaman	80%	92,33%	115,41%	100%	115,41%
Capaian akhir					115,41%

Extra effort yang dilakukan dalam pencapaian IKU ini berupa pelaksanaan media monitoring, pengelolaan konten *website* dan media sosial, publikasi kegiatan dan mitra strategis di media massa, dan tindak lanjut kegiatan usulan dari *stakeholder* komoditas perkebunan.

5b-N Persentase penyelesaian kerja sama dalam rangka perluasan pasar ekspor perkebunan

1. Definisi dan Formula IKU

IKU Persentase penyelesaian kerja sama dalam rangka perluasan pasar ekspor perkebunan mengukur capaian kegiatan promosi, misi dagang, negosiasi bilateral, dan negosiasi forum multilateral yang didukung atau diikuti oleh BPDP yang menghasilkan komitmen perdagangan atau pengurangan hambatan regulasi terkait

produk kelapa sawit dan turunannya di negara-negara yang bukan merupakan negara tujuan ekspor utama produk kelapa sawit Indonesia. Bentuk komitmen dapat berupa Nota Kesepahaman (MoU, MoC, MoA), Perjanjian Bilateral maupun Multilateral, maupun Transaksi yang dilakukan secara *Business to Business*, *Business to Government*, dan/atau *Government to Government*. Termasuk dalam kategori perluasan ekspor adalah pengenalan/penjualan jenis produk turunan sawit ke suatu negara yang bukan merupakan jenis produk ekspor utama komoditas sawit di negara tersebut.

IKU ini dihitung berdasarkan rata-rata capaian dari seluruh kegiatan perluasan pasar ekspor sawit dengan target 100% pada implementasi 6 kegiatan. Tujuan IKU adalah untuk mengukur kegiatan promosi sawit yang bertujuan mengembangkan pasar ekspor sawit di negara-negara yang bukan merupakan negara-negara utama tujuan ekspor produk sawit dan turunannya.

Kegiatan tersebut dihitung dengan kriteria:

Tabel 3.38 Kriteria kegiatan perluasan pasar ekspor perkebunan

Kriteria tahapan kegiatan	Bobot
Tersusunnya rencana kegiatan perluasan pasar ekspor sawit	60
Pengusulan pelaksanaan kegiatan perluasan pasar ekspor sawit	80
Kegiatan perluasan pasar ekspor sawit terlaksana	100
Kegiatan menghasilkan Nota Kesepahaman dan/atau komitmen transaksi	110
Kegiatan menghasilkan Perjanjian Kerja Sama (bilateral/multilateral) dan/atau transaksi ekspor	120

2. Capaian IKU

Capaian persentase perluasan pasar ekspor sebesar 221,67% dengan rincian realisasi kegiatan perluasan pasar ekspor perkebunan s.d. Desember 2025 sebanyak 13 kegiatan.

Tabel 3.39 Capaian Persentase penyelesaian kerja sama dalam rangka perluasan pasar ekspor perkebunan

BPDP	5b-N Persentase penyelesaian kerja sama dalam rangka perluasan pasar ekspor perkebunan							PoI/KP
	T/R	Q1	Q2	s.d. Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	91.67%	105%	105%	165%	165%	221,67%	221,67%	
Capaian	366%	211%	210%	220%	220%	221,67%	221,67%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Rincian kegiatan kerja sama dalam rangka perluasan pasar ekspor perkebunan, sebagai berikut:

Tabel 3.40 Realisasi kegiatan kerja sama dalam rangka perluasan pasar ekspor perkebunan

No	Nama Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Keterangan	Bobot Capaian
1.	7 th Pakistan Edible Oil Conference (PEOC) 2025	10 – 11 Januari 2025	Terlaksana dan terdapat MoU	110
2.	Palmex Indonesia 2025	14 – 15 Mei 2025	Terlaksana	100
3.	Praktik Ekspor Untuk UKM Sawit dan Pelepasan Ekspor Alumni Inkubasi Bisnis UKM Sawit BPDP di Padang	23 – 25 April 2025	Terlaksana	100
4.	Praktik Regulasi dan Prosedur Ekspor Produk UMKM Kelapa Sawit di Medan	29 – 30 April 2025	Terlaksana	100
5.	Kampanye Positif Kelapa Sawit di Luar Negeri	1 Juni – 30 November 2025	Terlaksana dan MoU	110
6.	China – ASEAN Expo 2025	17 – 21 September 2025	Terlaksana dan MoU	110
7.	Globoil India 2025	24 – 26 September 2025	Terlaksana dan MoU	110
8.	Anuga Food Fair 2025	4 – 8 Oktober 2025	Perencanaan	60
9.	Partisipasi Malaysian Palm Oil Forum Turkiye 2025	7 - 9 Oktober 2025	Terlaksana	100
10.	Osaka Expo	7 – 12 Oktober 2025	Terlaksana dan ada Transaksi	120
11.	Trade Expo Indonesia	15 – 19 Oktober 2025	Terlaksana dan MoU	110
12.	Partisipasi International Indonesia Agribusiness Expo	6 – 8 November 2025	Terlaksana	100
13.	Praktik Ekspor dan Workshop Produk Olahan Kelapa	14 – 16 November 2025	Terlaksana	100
Jumlah Bobot Total				1.330%
Realisasi (Target 6 Kegiatan)				221,67%

Extra effort yang dilakukan dalam pencapaian IKU ini adalah:

- 1) Koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan dan KBRI terkait informasi pasar sawit.
- 2) Dukungan pendanaan kegiatan promosi sawit bertaraf internasional di dalam negeri.
- 3) Dukungan pendanaan kegiatan praktik ekspor dan *business matching* bagi produk UKM Sawit.

SS 6 Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel

Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel adalah pengelolaan keuangan dalam suatu organisasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip *Good Governance*.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, BPDP mengidentifikasi 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel 3.41.

Tabel 3.41 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6

SS 6: Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel					
Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Nilai
6a-CP	Persentase penyelesaian rekomendasi penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko	100%	118.75%	118.75%	120%
6b-N	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan dari Pembina Keuangan/Pembina Teknis / SPI/ Dewan Pengawas/APIP dan/atau BPK	97%	98.99%	102,05%	102,05%

6a-CP Persentase penyelesaian Rekomendasi penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR)

1. Definisi dan Formula IKU

Manajemen risiko diterapkan pada setiap pelaksanaan kegiatan di lingkungan BLU BPDP dalam rangka pencapaian sasaran organisasi dengan mengelola risiko pada tingkat yang dapat diterima, sehingga perlu penilaian kematangan penerapan manajemen risiko pada BLU BPDP. Penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Bagian Kepatuhan Internal selaku Unit Kepatuhan Internal UE-1 yang sudah dilakukan *Quality Assurance* oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Pengukuran Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko mengacu pada Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Nomor PER-14/IJ/2022 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan.

2. Capaian IKU

Implementasi manajemen risiko di BPDP dilaksanakan secara konsisten dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/KMK.01/2022 serta KEP-252/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Manajemen Risiko.

Pelaksanaan manajemen risiko tersebut mencakup pemenuhan aspek struktur, kerangka kerja, dan budaya sadar risiko secara terintegrasi.

Pada aspek struktur manajemen risiko, BPDP telah menetapkan KEP-286/DPKS/2025 tentang Struktur Manajemen Risiko dan KEP-298/DPKS/2025 tentang Tim Pengelola Manajemen Risiko, sebagai landasan penetapan peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan risiko organisasi. Selanjutnya, pada aspek kerangka kerja manajemen risiko, BPDP telah menetapkan Piagam dan Profil Manajemen Risiko Tahun 2025 Nomor 9/PB-BPDP/2025 tanggal 31 Januari 2025, yang menjadi acuan pelaksanaan manajemen risiko secara menyeluruh di lingkungan BPDP.

Dalam rangka penguatan budaya sadar risiko, BPDP melaksanakan berbagai kegiatan komunikasi, evaluasi, dan peningkatan pemahaman, antara lain melalui rapat evaluasi Profil Risiko Tahun 2024 dan penyusunan Profil Risiko Tahun 2025, rapat tindak lanjut penilaian tugas Kepatuhan Internal oleh Setditjen serta penilaian *Quality Assurance* atas Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR) oleh Inspektorat Jenderal, serta pelaksanaan *sharing session* implementasi manajemen risiko menuju tata kelola risiko terintegrasi (*Governance, Risk, and Compliance/GRC*).

Berdasarkan Penilaian TKPMR yang dilakukan oleh Setditjen Perbendaharaan pada September 2024, BPDP memperoleh skor 4,30 dengan kategori *Managed Risk*. Selanjutnya, hasil *Quality Assurance* oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan pada Triwulan IV Tahun 2024 menetapkan nilai koreksi menjadi 4,12 dengan tetap berada pada kategori *Managed Risk*, yang menunjukkan penerapan manajemen risiko telah terkelola secara efektif.

Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi *Audit of Implementation* (AOI) dari Inspektorat Jenderal, terdapat 4 rekomendasi *area of improvement* yang harus ditindaklanjuti oleh BPDP, yaitu (1) Memastikan perumusan IKU dalam proses *refinement* IKU tahun 2025 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, (2) Memastikan kelengkapan dokumen terkait penghargaan atas penerapan manajemen risiko, (3) Melaksanakan survei pemahaman manajemen risiko kepada seluruh pengelola risiko, dan (4) Mengevaluasi profil risiko BPDPKS untuk menilai kembali level dampak dan kemungkinan risiko fraud dan reputasi, serta mengidentifikasi risiko dalam proses bisnis utama BPDPKS, khususnya terkait penyalahgunaan Dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

BPDP telah menyelesaikan seluruh rekomendasi *area of improvement* tersebut, dengan rincian tindak lanjut terkait penetapan Perjanjian Kinerja Direktur Utama 2025, Piagam dan Adendum Profil Manajemen Risiko 2025, dan pemberian penghargaan kepada Pengelola Risiko selesai triwulan I 2025 dan mendapatkan nilai indeks 120. Sedangkan tindak lanjut terkait pelaksanaan survei pemahaman manajemen risiko selesai pada triwulan II 2025 yang bekerja sama dengan Setditjen

Perbendaharaan dan mendapatkan nilai Indeks 115. Dengan demikian, capaian tindak lanjut rekomendasi TKPMR BPDP mencapai 118,75%.

Tabel 3.42 Capaian Persentase penyelesaian rekomendasi penilaian TKPMR

BPDP	6a-CP Tingkat Persentase penyelesaian rekomendasi penilaian TKPMR							
T/R	Q1	Q2	s.d. Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoL/K P
Target	20%	40%	40%	65%	65%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	20%	100%	100%	100%	100%	118,75%	118,75%	
Capaian	100%	250%	250%	153,85%	153,85%	118,75%	118,75%	
Nilai Kinerja	100%	120%	120%	120%	120%	118,75%	118,75%	

6b-N Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan dari Pembina Keuangan / Pembina Teknis / SPI / Dewan Pengawas / APIP dan/atau BPK

1. Definisi dan Formula IKU

KU Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan dari Pembina Keuangan / Pembina Teknis / SPI / Dewan Pengawas / APIP dan/atau BPK mengukur kepatuhan unit di lingkungan BPDP dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, Itjen Kemenkeu, SPI dan/atau KAP. Tindaklanjut dari tiap unit kerja dilakukan dengan supervisi dari SPI.

IKU ini dihitung melalui perbandingan antara total realisasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan total rekomendasi yang diterbitkan, yang dinyatakan dalam bentuk persentase dengan target ditetapkan sebesar 97%. IKU ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BPDP.

2. Capaian IKU

Sampai dengan triwulan IV 2025, sebanyak 98 dari 99 rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti sehingga realisasi sebesar 98,99%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.43 Capaian Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan dari Pembina Keuangan / Pembina Teknis / SPI / Dewan Pengawas / APIP dan/atau BPK

BPDP	6b-N Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan dari Pembina Keuangan / Pembina Teknis / SPI / Dewan Pengawas / APIP dan/atau BPK							
T/R	Q1	Q2	s.d. Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoL/K P
Target	20%	40%	40%	65%	65%	97%	97%	Max/ TLK
Realisasi	77%	85%	85%	85%	85%	98,9%	98,9%	
Capaian	385%	212%	212%	212%	212%	102,05%	102,05%	

BPDP	6b-N Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan dari Pembina Keuangan / Pembina Teknis / SPI / Dewan Pengawas / APIP dan/atau BPK						
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	102,05%	102,05%

Rincian capaian rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sebagai berikut:

- a. BPK PDDT 2023 (8 dari 8): atas 15 rekomendasi yang diterima, sebanyak 8 rekomendasi yang dihitung 2025, yaitu Dokumen Tarif PE; Kajian Insentif Biodiesel, HPS Biodiesel; Perjadin Peneliti, Evaluasi Kerja sama LN, Pemanfaatan hasil kerja sama promosi LN, Evaluasi ISPO, dan Risiko ISPO telah selesai ditindaklanjuti.
- b. BPK LK 23 (2 dari 2): Atas 2 rekomendasi Penatausahaan Piutang Kurang Bayar PE dan Penatausahaan Investasi Jangka Panjang telah ditindaklanjuti.
- c. ITJEN (2 dari 2): Atas 2 temuan terkait Operator Investasi Pemerintah telah selesai ditindaklanjuti.
- d. Pembina Teknis/Keuangan (31 dari 31): Atas 31 rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti dan masih menunggu pembahasan dengan Pembina Teknis.
- e. SPI (3 dari 4):
 - 1) Rekomendasi terkait pengembangan aplikasi Pengembangan SDMPKS (Beasiswa) telah selesai penunjukan vendor pengembang aplikasi.
 - 2) Rekomendasi terkait Swakelola PPKS terdapat 5 rekomendasi, sebanyak 3 rekomendasi menjadi target penyelesaian tahun 2025 dan 2 rekomendasi jatuh tempo penyelesaian Tahun 2026.
 - 3) Atas 3 rekomendasi di tahun 2025 telah diselesaikan 2 rekomendasi, terkait koordinasi perencanaan dana swakelola tahun sebelumnya dan koordinasi SK Tim PKF.
- f. Dewan Pengawas (52 dari 52): Terdapat 52 rekomendasi yang masuk dalam pemantauan tahun 2025 telah ditindaklanjuti.

SS 7 Pengelolaan organisasi yang adaptif

Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi tercermin dengan adanya perilaku anggota organisasi yang memiliki komitmen kuat terhadap organisasi, hubungan yang harmonis di antara setiap anggota organisasi, serta motivasi dan etos kerja yang tinggi. Organisasi kondusif dapat tercipta jika beberapa faktor berikut dapat berjalan dengan baik antara lain pola komunikasi dan hubungan-hubungan dalam interaksi antar personal yang mempengaruhi suasana kerja; program pengembangan SDM dan kualitas kerja; alur dan prosedur pelaksanaan kegiatan, model jalur koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan kerja; mekanisme penyampaian pendapat dan tingkat kebebasan dalam menyampaikan pendapat; serta program peningkatan kesejahteraan (termasuk pola jenjang karier). Dengan organisasi yang kondusif, pencapaian tujuan organisasi akan berjalan dengan baik.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, BPDP mengidentifikasi 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan penjelasan sebagai berikut:

7a-N Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization*

1. Definisi dan Formula IKU

Sebagaimana amanat Menteri Keuangan dalam KMK Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, bahwa seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan perlu mendorong peningkatan implementasi pengelolaan kinerja secara berkelanjutan. Sebagai salah satu langkah untuk mendorong komitmen pimpinan unit dan seluruh pegawai terhadap peningkatan kualitas pengelolaan kinerja, Manajer Kinerja Organisasi DJPb melaksanakan penilaian terhadap implementasi pengelolaan kinerja di masing-masing unit kerja di lingkungan DJPb.

Penilaian implementasi pengelolaan kinerja tersebut difokuskan terhadap hasil capaian kinerja yang telah direalisasikan, serta pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja berlandaskan *Strategy Focused Organization* (SFO). SFO merupakan prinsip-prinsip yang dijalankan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja yang sudah menjadi komitmen pimpinan dan seluruh pegawai. Prinsip-prinsip SFO antara lain: a. Menggerakkan perubahan dari tingkat pimpinan b. Menerjemahkan strategi ke dalam terminologi operasional c. Menyelaraskan organisasi dengan strategi d. Cara memotivasi sehingga strategi adalah pekerjaan setiap individu dan e. Kendali untuk membuat strategi sebagai proses berkelanjutan.

Penilaian tersebut dilaksanakan terhadap 2 (dua) parameter, yaitu: nilai kuantitatif pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja dan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BPDP Tahun sebelumnya. IKU ini diukur berdasarkan hasil penilaian dari Sekretariat Ditjen Perbendaharaan dengan target sebesar 85. Adapun IKU ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja organisasi di BPDP.

2. Capaian IKU

Capaian yang diukur pada Triwulan IV 2025 berdasarkan kelengkapan laporan SFO periode triwulan IV 2024 s.d. Triwulan III 2025 yang hasilnya ditetapkan dalam Keputusan Seditjen Perbendaharaan. Berdasarkan KEP-14/PB.1/2026, BPDP mendapatkan nilai pelaksanaan manajemen kinerja berbasis SFO Tahun 2025 sebesar 89,15, dengan target sebesar 85 maka capaian sebesar 104,89%.

Tabel 3.44 Capaian Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization*

BPDP	SS 7 7a-N Pengelolaan organisasi yang adaptif Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>								
	T/R	Q1	Q2	s.d. Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP

BPDP	SS 7 Pengelolaan organisasi yang adaptif 7a-N Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>							Max/ TLK
	Target	85%	85%	85%	85%	85%	85%	
Realisasi	85%	85%	85%	85%	85%	89,15%	89,15%	
Capaian	100%	100%	100%	100%	100%	104,89%	104,89%	
Nilai Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	104,89%	104,89%	

SS 8 Pengelolaan keuangan yang akuntabel

Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder*. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi *output* sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, BPDP mengidentifikasi 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan penjelasan sebagai berikut:

8a-CP Indeks kinerja anggaran Kemenkeu

1. Definisi dan Formula IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi *output* sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU ini berdasarkan ketentuan pada PMK 62 Tahun 2023 beserta perubahannya pasal 249 ayat (7), yaitu Nilai kinerja anggaran Kementerian/Lembaga merupakan hasil penjumlahan dari 50% dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran (EKA) dan 50% dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran (IKPA).

Pada triwulan IV 2025, capaian kinerja yang dihitung berdasarkan nilai komposit dari 50% indikator SMART dan 50% nilai IKPA, yang secara keseluruhan dimaksudkan untuk memenuhi target Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebesar 91,0 dengan indeks capaian 100. Adapun kriteria indeks capaian sebagai berikut:

Tabel 3.45 Kriteria Indeks Capaian Kinerja Anggaran

Indeks Capaian	Kriteria
120	Realisasi NKA $\geq 95,00$
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$

100	Realisasi NKA = 91
80 < X < 100	80 + (Realisasi NKA – 80) : 0,55 ** (80<x<91)
80	Realisasi NKA = 80
79.9	Realisasi NKA < 80

2. Capaian IKU

Capaian BPDP periode s.d. Desember 2025, penilaian IKPA (DJPb) sebesar 100, sedangkan penilaian EKA (DJA) yang terdiri dari efektivitas capaian output (75%) dan Efisiensi (25%) sebesar 99,84. Nilai EKA tidak mencapai hasil maksimal disebabkan oleh adanya capaian *output* yang belum memenuhi target, khususnya pada Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Sehingga capaian akhir NKA sebesar 99.92 atau berada pada indeks capaian 120.

Tabel 3.46 Capaian Indeks Kinerja Anggaran Kemenkeu

BPDP	SS 8 8a-N Pengelolaan keuangan yang akuntabel Indeks Kinerja Anggaran Kemenkeu								
	T/R	Q1	Q2	s.d. Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	100	Max/ TLK
Realisasi	105,26	105,26	105,26	105,26	105,26	105,26	120	120	
Capaian	105,26%	105,26%	105,26%	105,26%	105,26%	105,26%	120%	120%	
Nilai Kinerja	105,26%	105,26%	105,26%	105,26%	105,26%	105,26%	120%	120%	

Adapun rincian capaian penilaian IKPA (DJPb) dan EKA (DJA), sebagai berikut:

Tabel 3.47 Rincian hasil penilaian IKPA dan EKA

Penilaian IKPA				BOBOT	HASIL	NILAI	Penilaian EKA			
A. PERENCANAAN ANGGARAN				25,00%	25,00	100,00	Bobot	Hasil	Nilai	
1	Revisi DIPA			10,00%	10,00	100,00	Efektivitas	75%	74,84	99,78
2	Deviasi Halaman III DIPA*			15,00%	15,00	100,00	Efektivitas pada Capaian RO	75%	75,00	100,00
B. PELAKSANAAN ANGGARAN				25,00%	25,00	100,00	Efisiensi	25%	25,00	100,00
2	Capaian Output			25,00%	25,00	100,00	Penggunaan SBK	10%	10,00	100,00
TOTAL Nilai				50,00%	50,00	100,00	Efisiensi SBK	15%	15,00	100,00
Nilai IKPA sd Desember 2025				100			Nilai Realisasi Desember 2025	99,84		

Extra effort yang dilakukan dalam pencapaian IKU ini adalah BPDP melakukan koordinasi intensif dengan unit internal serta mitra kerja di lingkungan Kementerian Keuangan (Direktorat PA, Direktorat PPK BLU, dan KPPN Jakarta II) untuk memastikan seluruh pembaruan informasi, permasalahan, dan solusi dapat tereskalasi dan ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.

SS 9 Pengelolaan sarana dan TIK yang adaptif dan modern

Pengelolaan sarana dan TIK adalah proses manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap barang-barang bergerak dan

tidak bergerak yang dimiliki oleh BPDP. Optimal adalah pengelolaan sarana dan TIK dapat menjamin pelaksanaan kegiatan dan tugas untuk mencapai tujuan organisasi dapat berjalan dengan baik, efektif, dan efisien. Modern adalah pengelolaan sarana dan TIK mengikuti kebutuhan perkembangan zaman.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, BPDP mengidentifikasi 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan penjelasan sebagai berikut:

9a-N Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU

1. Definisi dan Formula IKU

Modernisasi Pengelolaan BLU adalah upaya untuk menerapkan teknologi informasi dalam pengembangan dan peningkatan kualitas layanan dan kinerja, yang antara lain mencakup pemanfaatan BIOS, penggunaan *Office Automation* (OA) atau aplikasi persuratan dan pemrosesan yang setara, dan pengembangan aplikasi untuk meningkatkan layanan utama BLU selama kurun waktu 1 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025.

Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU pada tahun 2025 terdiri dari 2 (dua) indikator yang ditargetkan sebesar 100%, dengan penjelasan:

Tabel 3.48 Indikator Penilaian Modernisasi Pengelolaan BLU

No	Uraian	Skor per indikator	Bobot (%)
I	Integrasi Data (<i>Extra Mile</i>)		25
	a. Pengembangan Webservice pada Tahap Development		
	1. Permintaan <i>secret key development</i>	10	
	2. Data terkirim pada <i>server development</i>	10	
	3. Pengiriman dilakukan dengan <i>scheduler/automation</i>	20	
	b. Pengembangan <i>webservice</i> pada Tahap Production		
	1. Permintaan <i>secret key production</i>	10	
	2. Data terkirim pada <i>server production</i>	20	
	c. Kelengkapan Pengiriman Data	30	
II	Operasionalisasi BIOS		100
	Kelengkapan Data pada Modul BIOS:		
	a. Profil non SDM	6,66	
	b. Profil SDM	6,66	
	c. Data Layanan	6,66	
	d. Data Keuangan	6,66	
	e. Rencana Bisnis Anggaran Indikatif	6,66	
	f. Rencana Bisnis Anggaran Definitif	6,66	
	g. Rencana Strategis Bisnis	6,66	
	h. Dokumen Kontrak Kinerja	6,66	
	i. Dokumentasi	6,66	
	j. Pembinaan	6,66	
	k. Dewas	6,66	

No	Uraian	Skor per indikator	Bobot (%)
	l. <i>Maturity Rating Assessment</i>	6,66	
	m. Usulan Tarif	6,66	
	n. Laporan Pelaksanaan Tarif	6,66	
	o. Laporan Pelaksanaan Remunerasi	6,66	

Adapun capaian tambahan Integrasi Data diperhitungkan pada saat indikator operasionalisasi BIOS tercapai 100%. IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat modernisasi pengelolaan BLU dalam mendukung peningkatan layanan, akuntabilitas dan akurasi manajemen dalam pengambilan keputusan.

2. Capaian IKU

Realisasi aspek Operasionalisasi BIOS sampai dengan 31 Desember 2025, dari 15 item modul telah tercapai 100%, sedangkan aspek data *webservice*, terdapat 94% data *endpoint* yang telah terkirim secara harian.

Tabel 3.49 Capaian Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU

BPD	SS 9 9a-N Pengelolaan sarana dan TIK yang adaptif dan modern Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU							
	T/R	Q1	Q2	s.d. Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	
Capaian	100%	100%	100%	100%	100%	124,56%	124,56%	
Nilai Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	120%	120%	

Adapun rincian capaian aspek integrasi data, sebagai berikut:

Tabel 3.50 Capaian Integrasi Data (*extra miles*)

No	Kriteria Penilaian	Kriteria Capaian	Bobot	Nilai Tertimbang
1	Pengembangan <i>webservice</i> pada tahap development		40%	40%
	a. Permintaan <i>secret key development</i>	Sudah	25	10%
	b. Data terkirim pada <i>server development</i>	Sudah	25	10%
	c. Pengiriman dilakukan dengan <i>scheduler / automation</i>	Sudah	50	20%
2	Pengembangan <i>webservice</i> pada <i>server production</i>		30%	30%
	a. Permintaan <i>secret key production</i>	Sudah	33,3	10%
	b. Data terkirim pada <i>server production</i>	Sudah	66.7	20%
3	Kelengkapan Pengiriman Data		30%	28.23%

No	Kriteria Penilaian	Kriteria Capaian	Bobot	Nilai Tertimbang
	Pengiriman data rutin dilakukan sesuai manual API pada Aplikasi BIOS (Melakukan transfer data setiap hari dengan toleransi H+3)	94%	100	28.23%
Capaian Integrasi Data (max. 25%)				24,56%

B. Realisasi Anggaran

Selama periode Tahun 2025, Badan Pengelola Dana Perkebunan telah melakukan 10 kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan 5 kali revisi yang mengakibatkan perubahan pagu. Rincian anggaran BPDP Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.51 Rincian Anggaran BPDP Tahun 2025

Uraian	TA 2025	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan BLU	14.269.500.000.000	25.148.875.848.000
Jumlah Pendapatan	14.269.500.000.000	25.148.875.848.000
Belanja		
Belanja Barang	6.051.747.600.000	55.285.306.313.000
Belanja Modal	4.388.000.000	106.797.000.000
Jumlah Belanja	6.056.135.600.000	55.392.103.313.000

Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp33.237.094.153.758,- atau mencapai 132,16% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp25.148.875.848.000,-. Pendapatan BPDP terdiri dari Pendapatan Jasa Layanan Umum seperti Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Pendapatan Dana Perkebunan – Komoditas Perkebunan Strategis Lainnya, dan Pendapatan Investasi. Selain itu, terdapat Pendapatan BLU Lainnya seperti Pendapatan Jasa Layanan Perbankan Badan Layanan Umum, Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu, dan Pendapatan Lain-lain BLU. Pada TA 2025, realisasi Pendapatan Jasa Layanan Umum mengalami peningkatan sebesar 28,35% dari tahun sebelumnya. Salah satu komponen pendapatan yang mengalami peningkatan signifikan adalah Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang terealisasi sebesar Rp31.504.908.924.225,-, naik 22,33% dari capaian tahun 2024.

Belanja

Realisasi Belanja BPDP sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp49.822.564.405.090,00 atau mencapai 89,95% dari anggaran belanja sebesar Rp55.392.103.313.000,00.

Secara umum, rincian pendapatan dan belanja BPDP adalah sebagai berikut:

Tabel 3.52 Rincian Realisasi Anggaran

(pagu dan realisasi dalam jutaan rupiah)

Uraian	s.d. Desember 2024			s.d. Desember 2025			YoY
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	
Pendapatan	28.407.197	28.680.143	101	25.148.875	33.237.094	132	16,67
Belanja Barang	31.594.222	31.486.430	99,7	55.285.306	49.757.823	90	58,03
Belanja Modal	73.900	11.604	15,7	106.797	64.741	60	457,9

Sebagaimana tabel 3.52 di atas, dapat dilihat bahwa kinerja pendapatan dan belanja menunjukkan dinamika yang cukup signifikan pada periode laporan tahun 2025. Dari sisi pendapatan, realisasi s.d. 31 Desember 2025 mencapai Rp33,24 triliun, atau 132% dari target pendapatan dan meningkat 16% YoY dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp28,68 triliun.

Pada komponen Belanja Barang, realisasi sampai dengan Desember 2025 mencapai Rp49,76 triliun atau 90% dari pagu, yang menunjukkan pertumbuhan 58,03% YoY dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp31,49 Triliun. Peningkatan belanja ini mencerminkan adanya kebutuhan operasional yang lebih tinggi dan penyesuaian program kerja pada periode 2025, khususnya dalam penyaluran selisih harga Biodiesel.

Sementara itu, Belanja Modal TA 2025 mengalami pertumbuhan signifikan, yaitu sebesar 457,9% YoY. Realisasi belanja modal meningkat dari Rp11,60 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp64,74 miliar pada tahun 2025 dengan tingkat penyerapan 60% dari pagu. Kenaikan Belanja Modal terutama disebabkan oleh kebutuhan pengadaan peralatan dan mesin berupa meja kerja dan laptop untuk mendukung kelancaran operasional, menggantikan barang yang rusak, serta meningkatkan produktivitas dan fleksibilitas kerja. Selain itu, peningkatan belanja juga berasal dari investasi pada aset tak berwujud melalui pengembangan berbagai sistem informasi layanan dan operasional BPDP, sebagai bagian dari upaya memperkuat infrastruktur digital BPDP. Adapun tambahan belanja lainnya berasal dari renovasi interior dan eksterior kantor BPDP seiring pemanfaatan Gedung Surachman Tjokrodisurjo sebagai kantor BPDP sejak Mei 2025.

Tabel 3.53 Rincian Realisasi Anggaran Belanja dan Output Tahun 2025

(data anggaran dalam jutaan rupiah)

Kode	Uraian	Anggaran Belanja (Juta Rupiah)			Keluaran/Output			
		Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%
4712CAN001	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1.600,00	1.494,35	93,40%	50	50	Unit	100.00%
4712EBA001	Rekomendasi Pengelolaan Organisasi	5.585,03	2.800,99	50,15%	1	1	Laporan	100.00%
4712EBA002	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran	4.939,76	1.866,77	37,79%	12	12	Layanan	100.00%
4712EBA994	Layanan Perkantoran	94.380,36	80.054,98	84,82%	12	12	Layanan	100.00%
4712EBB001	Peralatan Fasilitas Perkantoran	102.147,00	61.773,16	60,47%	40	40	Unit	100.00%
4712EBC001	Pengembangan SDM	2.469,00	1.575,68	63,82%	115	115	Orang	100.00%
4712EBD001	Rencana Kerja dan Anggaran Unit	413,59	17,69	4,28%	1	1	Dokumen	100.00%
4712EBD002	Laporan Keuangan Unit	72,05	4,36	6,05%	4	4	Laporan	100.00%

Kode	Uraian	Anggaran Belanja (Juta Rupiah)			Keluaran/Output			
		Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%
4712EBD003	Rekomendasi Penerapan Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal	2.038,00	1.031,52	50,61%	15	15	Laporan	100.00%
4712EBD974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	430,00	253,91	59,05%	1	1	Layanan	100.00%
4712FAB003	Sistem Aplikasi Internal	4.300,00	2.676,68	62,25%	4	4	Modul Aplikasi	100.00%
4712FAM001	PNBP/Imbal Hasil Kelolaan Dana BLU	8.018,71	4.596,63	57,32%	665	665	Milyar	100.00%
4712FAM003	Pendanaan untuk Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit	213.814,99	115.293,21	53,92%	92	192	Rupiah	208.70%
4712FAM004	Pendanaan untuk Promosi dan Kemitraan Sawit	181.340,40	78.592,28	43,34%	90	172	Rupiah	191.11%
4712FAM005	Pendanaan untuk Peremajaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit	3424.254,80	1.475.265,93	43,08%	45.370	43.590	Hektar	96.08%
4712FAM006	Pendanaan untuk SDM Perkebunan Kelapa Sawit	623.980,61	524.480,21	84,05%	7.550	19.939	Orang	264.09%
4712FAM007	Pendanaan untuk Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit	422.319,02	297.565,34	70,46%	16.000	28.917	Rupiah	180.73%
4712UAM201	Pendanaan untuk Volume Penyaluran Selisih Harga Biodiesel (PN)	50.300.000	4.717.3220	93,78%	7,3	8,114	Juta Kiloliter	111.15%

Secara umum, realisasi anggaran BPDP selaras dengan *output* yang direncanakan. Sebagian besar kegiatan mencapai target keluaran, bahkan beberapa program strategis melampaui target dan hanya terdapat 1 kegiatan yang belum mencapai target keluaran. Adapun realisasi serapan anggaran bervariasi, diantaranya pada kegiatan administrasi memiliki serapan rendah akan tetapi *output* tetap tercapai, sedangkan kegiatan operasional menunjukkan kesesuaian antara serapan dan capaian.

C. Kinerja Lainnya

1. Implementasi Pengarusutamaan Gender

Dalam rangka melaksanakan kebijakan Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial (PUGIS) di lingkungan Kementerian Keuangan, telah ditetapkan Tim Penggerak Implementasi Pengarusutamaan Gender Kementerian Keuangan Tahun 2025 (Tim PUG) melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 278/MK/SJ/2025. Dalam struktur tersebut, BPDP berperan sebagai anggota Kelompok Kerja Inovasi Responsif Gender pada Bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Negara.

Dasar hukum yang menjadi landasan BPDP dalam mendukung pelaksanaan PUG secara terstruktur, terkoordinasi, dan sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Keuangan, yaitu:

- a. Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-97/PB.1/2025 tentang Tim Pelaksana Teknis Penguatan Kebijakan Implementasi Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2025; dan

- b. Keputusan Direktur Utama BPDP Nomor KEP-71/BPDP/2025 tentang Pembentukan Tim Implementasi Pengarusutamaan Gender di lingkungan BPDP Tahun 2025.

Dalam mendukung PUG Kementerian Keuangan, BPDP melaksanakan 2 kegiatan mandatori, yaitu:

- 1) Diseminasi Hasil Grant Riset Sawit

BPDP menyelenggarakan diseminasi hasil Grant Riset Sawit dengan tema Pengaruh Stres Peran, Emosi Negatif, dan Kecerdasan Emosi dalam Meminimalisir Penyimpangan Kerja pada Pekerja Perkebunan Kelapa Sawit. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit terkait pentingnya aspek kesehatan mental dan kesehatan reproduksi pekerja dalam lingkungan industri kelapa sawit, sebagai bagian dari upaya penerapan prinsip inklusi sosial dan kesetaraan gender.



Gambar 3.2 *Keynote Speech* Sesditjen Perbendaharaan

Kegiatan tersebut turut menghadirkan Sekretaris Ditjen Perbendaharaan sebagai *keynote speaker* yang menegaskan pentingnya integrasi PUG dalam kebijakan, penganggaran, dan layanan publik guna mewujudkan pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Praktik PUG di Kemenkeu/DJPb diharapkan menjadi rujukan bagi BLU, termasuk BPDP, untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam tata kelola organisasi dan program secara berkelanjutan.

- 2) Diseminasi Program Beasiswa Sawit

BPDP melakukan sosialisasi program pendidikan SDM Perkebunan dalam upaya Peningkatan Penerima Beasiswa Sawit dari Daerah 3T (Terdepan, Terluar,

Tertinggal). Acara ini diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 2025 yang bertempat di Aula Setda, Kantor Bupati Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.

BPDP menghadirkan narasumber Direktur Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta serta mengundang perwakilan guru dan siswa dari 15 sekolah di Manggarai Barat dan 25 sekolah di Manggarai Timur untuk menyampaikan informasi Program Beasiswa Sawit bagi anak pekerja sektor sawit. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, diselenggarakan sesi diskusi yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan kepada narasumber terkait Program Beasiswa Sawit.



Gambar 3.3 Sosialisasi Beasiswa Sawit bagi Generasi Muda NTT

Pelaksanaan kegiatan BPDP di Manggarai Barat menunjukkan bahwa pemerintah setempat dan para guru di desa terpencil mengapresiasi sosialisasi Beasiswa Sawit, mengingat masih terbatasnya akses informasi terkait program tersebut. Kegiatan ini mencerminkan komitmen BPDP dalam memperluas pemerataan kesempatan pendidikan bagi generasi muda guna meningkatkan kualitas SDM sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit.

Selain 2 kegiatan tersebut, BPDP turut menyelenggarakan beberapa kegiatan dalam mendukung PUG diantaranya:

- 1) Peningkatan Keterampilan Wirausaha Kuliner untuk Pemberdayaan Kemandirian Perempuan dengan Produk Kelapa Sawit.
- 2) Sosialisasi dan Workshop Perlindungan Pekerja Perempuan di Perkebunan Sawit.
- 3) Peningkatan Keterampilan Wirausaha Kuliner dengan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia dengan Produk Kelapa Sawit.

2. Penghargaan-penghargaan

BPDP mendapatkan beberapa penghargaan pada tahun 2025, antara lain:

a. Penghargaan kelembagaan dan pelayanan terbaik bagi sektor sawit di Sawit Indonesia Expo & Conference (SIEXPO) 2025

BPDP meraih SIEXPO Award 2025 kategori Kelembagaan dan Pelayanan Terbaik bagi Sektor Sawit pada Sawit Indonesia Expo & Conference (SIEXPO) 2025 di Pekanbaru sebagai apresiasi atas komitmennya meningkatkan kualitas layanan dan keberlanjutan sektor sawit melalui beragam program, antara lain peremajaan, sarana-prasarana, pengembangan SDM, penelitian, promosi, hilirisasi, dan dukungan bahan bakar nabati.



Gambar 3.4 Penghargaan SIEXPO 2025

Penghargaan yang diterima oleh Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Umum BPDP, Zaid Burhan Ibrahim, menegaskan peran BPDP dalam mendukung inovasi dan nilai tambah sawit, termasuk pemberdayaan UMKM melalui riset, inkubasi, pelatihan, dan promosi produk. SIEXPO 2025 menghadirkan 166 *exhibitor* dari dalam dan luar negeri, serta menjadi bagian dari HUT ke-68 Provinsi Riau, menjadi momentum nasional memperkuat hilirisasi sawit dan ekosistem industri yang inklusif, sejalan dengan mandat baru BPDP untuk mengelola dana tiga komoditas (sawit, kelapa, kakao). Ajang ini menegaskan kontribusi strategis sektor sawit sebagai motor ekonomi dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

b. Penghargaan Komitmen Pemberdayaan 100 UMKM Sawit di 4th Sawit Indonesia Award 2025

BPDP menerima penghargaan Komitmen Pemberdayaan 100 UMKM Sawit pada 4th Sawit Indonesia Award 2025 sebagai pengakuan atas konsistensi program pemberdayaan UMKM sawit dari hulu hingga hilir. Penghargaan yang

diterima oleh Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Normansyah Hidayat Syahrudin, menegaskan kontribusi BPDP dalam mendorong hilirisasi dan penggunaan produk turunan sawit melalui berbagai program, termasuk peluncuran Katalog 100 Produk UKMK Sawit edisi kedua pada 2025.



Gambar 3.5 Penghargaan Sawit Indonesia Award 2025

BPDP dinilai proaktif memperkenalkan produk sawit kepada UMKM di berbagai daerah dan memenuhi indikator komunikasi, kontribusi berkelanjutan, serta keberlanjutan program. Penghargaan ini memperkuat posisi BPDP sebagai lembaga yang konsisten mendukung pengembangan industri sawit berkelanjutan dan peningkatan ekonomi pelaku UMKM.

c. Penghargaan Juara 1 dalam *Indonesia Tourism & Trade Investment Expo 2025*



Gambar 3.6 Penghargaan Indonesia Tourism & Trade Investment Expo 2025

BPDP menghadirkan berbagai produk unggulan UMKM berbasis kelapa sawit pada *Indonesia Tourism & Trade Investment Expo 2025* di Cihampelas Walk, Bandung (28–31 Agustus 2025) sebagai bentuk komitmen memperkuat pengembangan UMKM sawit melalui promosi, investasi, dan perluasan akses pasar. Atas pembukaan *booth* tersebut, BPDP berhasil meraih Juara 1 *Stand Terbaik*.

Melalui *booth* UMKM, BPDP menampilkan produk turunan sawit seperti Batik Sawit, *oleo food*, beragam produk e-katalog UMKM BPDP, serta demo interaktif pengolahan pangan berbahan sawit untuk mengedukasi masyarakat mengenai manfaat dan potensi ekonomi sawit. Kehadiran produk tersebut menunjukkan bahwa sawit mampu diolah menjadi produk kreatif, ramah lingkungan, dan bernilai tambah tinggi.

Dalam kesempatan tersebut, BPDP menegaskan dukungan berkelanjutan bagi UMKM sawit melalui program pendampingan, pelatihan, inovasi produk, dan promosi sebagai bagian dari misi memperluas informasi manfaat komoditas sawit bagi masyarakat dan dunia.

d. Apresiasi dari Ombudsman RI



Gambar 3.7 Apresiasi dari Ombudsman RI

Ombudsman RI menggelar acara Catatan Akhir Tahun Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2025 Sektor Perekonomian I pada tanggal 18 Desember 2025 di Kantor Ombudsman RI. BPDP sebagai salah satu Mitra Strategis Ombudsman RI memperoleh apresiasi atas dedikasi dan sinergi dalam memperkuat penyelenggaraan pelayanan publik di bidang perekonomian, khususnya dalam upaya pencegahan maladministrasi.

BAB 4

Penutup



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) BPDP Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggung-jawaban pencapaian visi dan misi BPDP pada tahun anggaran 2025 sekaligus bentuk ketaatan atas Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian kinerja BPDP Tahun 2025 secara umum telah melampaui target yang ditetapkan terdapat dan hanya terdapat 1 IKU yang belum tercapai, yaitu Persentase Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan. Hal ini menjadi evaluasi bagi BPDP untuk lebih meningkatkan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

Dengan disusunnya LAKIN ini diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan baik kepada pimpinan Kementerian Keuangan pada umumnya, Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada khususnya, maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi BPDP. Diharapkan pula LAKIN ini dapat menjadi umpan balik sebagai landasan peningkatan kinerja pada periode yang akan datang.



Lampiran

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
2. Piagam Manajemen Risiko Tahun 2025

Lampiran selengkapnya dapat dilihat pada [tautan ini](#).



**PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-55/PB/2025
DIREKTUR UTAMA BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**

Visi

Menjadi badan pengelola dana yang dinamis dan terpercaya dalam pengembangan komoditas perkebunan strategis nasional yang bernilai tambah, berdaya saing, dan berkelanjutan demi kemajuan, kemandirian, serta kesejahteraan rakyat



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
DIREKTUR UTAMA BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
1	Pengelolaan dana perkebunan yang berkelanjutan	1a-CP	Persentase penghematan devisa atas mandatory biodiesel	100%
		1b-CP	Persentase volume penyaluran biodiesel	100%
		1c-CP	Persentase jumlah orang/peserta program pengembangan SDM Perkebunan	100%
		1d-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%
2	Penyaluran dana perkebunan yang efektif	2a-N	Persentase penyaluran dana peremajaan perkebunan rakyat	100%
		2b-N	Persentase penyaluran dana sarana dan prasarana perkebunan	100%
		2c-N	Persentase kualitas riset perkebunan yang dikelola	100%
3	Pencapaian tugas khusus (spesial mission) yang efektif	3a-CP	Tingkat maturitas BLU	3 (Skala 5)
		3b-N	Persentase tingkat harga CPO	100%
		3c-N	Indeks akurasi proyeksi pendapatan dan belanja BLU	3.5 (Skala 5)
4	Penghimpunan dan pengembangan dana perkebunan yang optimal	4a-CP	Tingkat Imbal Hasil Pengelolaan Dana dan Kas	100%
		4a-N	Persentase Penghimpunan Dana	100%
5	Komunikasi publik dan kerja sama yang efektif	5a-N	Persentase efektivitas program promosi dan kerja sama	100%
		5b-N	Persentase penyelesaian kerja sama dalam rangka perluasan pasar ekspor perkebunan	100%
6	Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel	6a-CP	Persentase penyelesaian rekomendasi penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko	100%
		6b-N	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan dari Pembina Keuangan/Pembina Teknis/SPI/Dewan Pengawas/APIP dan/atau BPK	97%
7	Pengelolaan Organisasi yang adaptif	7a-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	85
8	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	8a-CP	Indeks kinerja anggaran Kemenkeu	100
9	Pengelolaan sarana dan TIK	9a-N	Persentase penyelesaian modernisasi	100%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	yang adaptif dan modern	pengelolaan BLU	

Program/Kegiatan 2025

Anggaran

Program:

Program Dukungan Manajemen

Rp6,056,135,600

Kegiatan

1. Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission) Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Rp6,056,135,600

Jakarta, 8 Desember 2025

Direktur Jenderal Perbendaharaan

Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan



Ditandatangani Secara Elektronik
Astera Primanto Bhakti

Ditandatangani Secara Elektronik
Eddy Abdurrachman



RINCIAN TARGET KINERJA
DIREKTUR UTAMA BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan dana perkebunan yang berkelanjutan							
1a-CP	Persentase penghematan devisa atas mandatory biodiesel	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
1b-CP	Persentase volume penyaluran biodiesel	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
1c-CP	Persentase jumlah orang/peserta program pengembangan SDM Perkebunan	10%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
1d-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Penyaluran dana perkebunan yang efektif							
2a-N	Persentase penyaluran dana peremajaan perkebunan rakyat	60%	70%	70%	80%	80%	100%	100%
2b-N	Persentase penyaluran dana sarana dan prasarana perkebunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2c-N	Persentase kualitas riset perkebunan yang dikelola	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
3	Pencapaian tugas khusus (spesial mission) yang efektif							
3a-CP	Tingkat maturitas BLU	3	3	3	3	3	3	3 (Skala 5)
3b-N	Persentase tingkat harga CPO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3c-N	Indeks akurasi proyeksi pendapatan dan belanja BLU	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5 (Skala 5)
4	Penghimpunan dan pengembangan dana perkebunan yang optimal							
4a-CP	Tingkat Imbal Hasil Pengelolaan Dana dan Kas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4a-N	Persentase Penghimpunan Dana	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
5	Komunikasi publik dan kerja sama yang efektif							
5a-N	Persentase efektivitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	program promosi dan kerja sama							
5b-N	Persentase penyelesaian kerja sama dalam rangka perluasan pasar ekspor perkebunan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
6	Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel							
6a-CP	Persentase penyelesaian rekomendasi penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko	20%	40%	40%	65%	65%	100%	100%
6b-N	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan dari Pembina Keuangan/Pembina Teknis/SPI/ Dewan Pengawas/ APIP dan/ atau BPK	20%	40%	40%	65%	65%	97%	97%
7	Pengelolaan Organisasi yang adaptif							
7a-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	85	85	85	85	85	85	85
8	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel							
8a-CP	Indeks kinerja anggaran Kemenkeu	100	100	100	100	100	100	100
9	Pengelolaan sarana dan TIK yang adaptif dan modern							
9a-N	Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%

Jakarta, 8 Desember 2025

Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan



Ditandatangani Secara Elektronik
Eddy Abdurrachman



INISIATIF STRATEGIS
DIREKTUR UTAMA BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			

Jakarta, 8 Desember 2025

Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan



Ditandatangani Secara Elektronik
Eddy Abdurrachman



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Eddy Abdurrachman		NAMA	Astera Primanto Bhakti
NIP	31740917 095200 0 004		NIP	19680120 199201 1 003
PANGKAT/ GOL RUANG	(_/_)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama (IV/e)
JABATAN	Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan		JABATAN	Direktur Jenderal Perbendaharaan
UNIT KERJA	Badan Pengelola Dana Perkebunan		UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Pengelolaan dana perkebunan yang berkelanjutan	Persentase penghematan devisa atas mandatory biodiesel	100%	Penerima Layanan
		Persentase volume penyaluran biodiesel	100%	Penerima Layanan
		Persentase jumlah orang/ peserta program pengembangan SDM Perkebunan	100%	Penerima Layanan
		Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	Penerima Layanan
2	Penyaluran dana perkebunan yang efektif	Persentase penyaluran dana peremajaan perkebunan rakyat	100%	Penerima Layanan
		Persentase penyaluran dana sarana dan prasarana perkebunan	100%	Penerima Layanan
		Persentase kualitas riset perkebunan yang	100%	Penerima Layanan

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 8 Desember 2025



		dikelola		
3	Pencapaian tugas khusus (spesial mission) yang efektif	Tingkat maturitas BLU	3 (Skala 5)	Proses Bisnis
		Persentase tingkat harga CPO	100%	Proses Bisnis
		Indeks akurasi proyeksi pendapatan dan belanja BLU	3.5 (Skala 5)	Proses Bisnis
4	Penghimpunan dan pengembangan dana perkebunan yang optimal	Tingkat Imbal Hasil Pengelolaan Dana dan Kas	100%	Proses Bisnis
		Persentase Penghimpunan Dana	100%	Proses Bisnis
5	Komunikasi publik dan kerja sama yang efektif	Persentase efektivitas program promosi dan kerja sama	100%	Proses Bisnis
		Persentase penyelesaian kerja sama dalam rangka perluasan pasar ekspor perkebunan	100%	Proses Bisnis
6	Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian rekomendasi penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko	100%	Proses Bisnis
		Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan dari Pembina Keuangan/Pembina Teknis/SPI/ Dewan Pengawas/APIP dan/atau BPK	97%	Proses Bisnis
7	Pengelolaan Organisasi yang adaptif	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	85	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	Indeks kinerja anggaran Kemenkeu	100	Penguatan Internal atau Anggaran
9	Pengelolaan sarana dan TIK yang adaptif dan modern	Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



PERILAKU KERJA		
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> -Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah -Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara -Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan -Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas -Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi -Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



Jakarta, 8 Desember 2025

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Eddy Abdurrachman
31740917 095200 0 004



Ditandatangani Secara Elektronik

Astera Primanto Bhakti
19680120 199201 1 003



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	126 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Persentase penghematan devisa atas mandatory biodiesel	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
1b-CP	Persentase volume penyaluran biodiesel	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
1c-CP	Persentase jumlah orang/peserta program pengembangan SDM Perkebunan	10%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
1d-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2a-N	Persentase penyaluran dana peremajaan perkebunan rakyat	60%	70%	70%	80%	80%	100%	100%
2b-N	Persentase penyaluran dana sarana dan prasarana perkebunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



2c-N	Persentase kualitas riset perkebunan yang dikelola	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
3a-CP	Tingkat maturitas BLU	3	3	3	3	3	3	3 (Skala 5)
3b-N	Persentase tingkat harga CPO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3c-N	Indeks akurasi proyeksi pendapatan dan belanja BLU	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5 (Skala 5)
4a-CP	Tingkat Imbal Hasil Pengelolaan Dana dan Kas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4a-N	Persentase Penghimpunan Dana	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
5a-N	Persentase efektivitas program promosi dan kerja sama	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-N	Persentase penyelesaian kerja sama dalam rangka perluasan pasar ekspor perkebunan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
6a-CP	Persentase penyelesaian rekomendasi penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko	20%	40%	40%	65%	65%	100%	100%
6b-N	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan dari Pembina Keuangan/Pembina Teknis/SPI/ Dewan Pengawas/ APIP dan/atau BPK	20%	40%	40%	65%	65%	97%	97%



	7a-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	85	85	85	85	85	85	85
	8a-CP	Indeks kinerja anggaran Kemenkeu	100	100	100	100	100	100	100
	9a-N	Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
KONSEKUENSI									
	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>								
	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>								

Jakarta, 8 Desember 2025

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Eddy Abdurrachman
31740917 095200 0 004

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Astera Primanto Bhakti
19680120 199201 1 003

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 8 Desember 2025





**PIAGAM MANAJEMEN RISIKO
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN,
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN,
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025
NOMOR: 9/PB-BPDP/2025**

Dalam rangka pencapaian sasaran organisasi pada Badan Pengelola Dana Perkebunan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, saya menyatakan bahwa:

1. Perumusan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, dan rencana mitigasi Risiko telah dilaksanakan sesuai ketentuan Manajemen Risiko yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.
2. Rencana mitigasi Risiko yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari piagam ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit yang saya pimpin.
3. Pemantauan dan reviu akan dilaksanakan secara berkala untuk meningkatkan efektifitas Manajemen Risiko.

Jakarta, 31 Januari 2025
Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan



Ditandatangani Secara Elektronik
Eddy Abdurrachman



DAFTAR RISIKO
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN, DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN, KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

No	Sasaran Organisasi	Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
			Awal Periode	Residual Harapan
1	Pengelolaan dana perkebunan yang berkelanjutan	1.1 Peningkatan bauran Mandatori Biodiesel	14 (Sedang)	24 (Sangat Tinggi)
		1.2 Dana Sawit tidak mencukupi untuk membayar insentif Biodiesel	20 (Sangat Tinggi)	10 (Rendah)
		1.3 Terlambatnya penyampaian dan tindak lanjut rekomendasi teknis dari Ditjenbun, Kementerian Pertanian	14 (Sedang)	4 (Sangat Rendah)
		1.4 Terdapat layanan BPDPKS yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan	12 (Sedang)	4 (Sangat Rendah)
		1.5 Persepsi negatif masyarakat atas pemberitaan di media massa dan media sosial	15 (Sedang)	10 (Rendah)
2	Penyaluran dana perkebunan yang efektif	2.1 Rendahnya jumlah penerbitan rekomtek yang disampaikan kepada BDPD	17 (Tinggi)	12 (Sedang)
		2.2 SK Dirut BPDPKS terkait Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit (SPPKS) lambat terbit	8 (Rendah)	8 (Rendah)
		2.3 Sedikitnya usulan penelitian yang direkomendasikan oleh komite litbang BPDPKS	17 (Tinggi)	7 (Rendah)
3	Pencapaian tugas khusus (<i>special mission</i>) yang efektif	3.1 Bukti dukung penilaian <i>maturity rating</i> tidak lengkap	9 (Rendah)	9 (Rendah)
		3.2 Tingkat harga CPO berada di bawah harga produksi	15 (Sedang)	10 (Rendah)



No	Sasaran Organisasi	Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
			Awal Periode	Residual Harapan
		3.3 Perhitungan proyeksi dan/atau realisasi pendapatan tidak akurat	10 (Rendah)	5 (Sangat Rendah)
4	Penghimpunan dan pengembangan dana perkebunan yang optimal	4.1 Penurunan suku bunga deposito perbankan dan nilai instrumen investasi obligasi	14 (Sedang)	9 (Rendah)
		4.2 Perbaikan/pemenuhan dokumen atas konfirmasi dari <i>stakeholder</i> (bea cukai dan/atau eksportir) membutuhkan waktu yang lama	1 (Sangat Rendah)	1 (Sangat Rendah)
5	Komunikasi publik dan kerja sama yang efektif	5.1 Terdapat persepsi negatif terhadap kelapa sawit pada media massa	19 (Tinggi)	8 (Rendah)
		5.2 Terdapat hambatan perizinan pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka perluasan pasar ekspor	1 (Sangat Rendah)	1 (Sangat Rendah)
6	Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel	6.1 Keterlambatan penyampaian Laporan Manajemen Risiko	5 (Sangat Rendah)	5 (Sangat Rendah)
		6.2 Terdapat rekomendasi hasil pengawasan dari Pembina Keuangan/Pembina Teknis yang terlambat diselesaikan tepat waktu	2 (Sangat Rendah)	1 (Sangat Rendah)
7	Pengelolaan Organisasi yang adaptif	7.1 Nilai kuantitatif pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di bawah nilai yang ditentukan oleh Kantor Pusat DJPb	16 (Tinggi)	11 (Rendah)
		7.2 <i>Ownership</i> pegawai terhadap organisasi	15 (Sedang)	10 (Rendah)



No	Sasaran Organisasi	Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
			Awal Periode	Residual Harapan
8	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	8.1 Terjadi deviasi yang melebihi 5% antara realisasi/pengesahan belanja dan Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan pada halaman III DIPA	17 (Tinggi)	4 (Sangat Rendah)
9	Pengelolaan sarana dan TIK yang adaptif dan modern	9.1 Data pada Aplikasi BIOS tidak terkirim setiap hari	16 (Tinggi)	11 (Rendah)
		9.2 Kebocoran data dan informasi bersifat konfidensial/rahasia	15 (Sedang)	10 (Rendah)

Jakarta, 31 Januari 2025
Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan



Ditandatangani Secara Elektronik
Eddy Abdurrachman





Badan Pengelola Dana Perkebunan